

ANALISIS SOSIAL EKONOMI PETANI DI PROVINSI PAPUA BARAT

Hasil Survei Pendapatan Rumah Tangga Usaha Pertanian
Sensus Pertanian 2013



<http://papuabarat.bps.go.id>



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI PAPUA BARAT**

ANALISIS SOSIAL EKONOMI PETANI DI PROVINSI PAPUA BARAT

Hasil Survei Pendapatan Rumah Tangga Usaha Pertanian
Sensus Pertanian 2013



© Badan Pusat Statistik Provinsi Papua Barat

ANALISIS SOSIAL EKONOMI PETANI DI PROVINSI PAPUA BARAT
Hasil Survei Pendataan Petani 2013

ISBN : 978-602-709-242-6

No. Publikasi : 91300.14.19

Katalog BPS : 5101014.91

Diproduksi : Badan Pusat Statistik Provinsi Papua Barat
Editor : Badan Pusat Statistik Provinsi Papua Barat
Bidang Neraca Wilayah dan Analisis Statistik
Seksi Analisis Statistik Lintas Sektor

Desain : Badan Pusat Statistik Provinsi Papua Barat
Bidang Neraca Wilayah dan Analisis Statistik
Seksi Analisis Statistik Lintas Sektor

Manokwari: Badan Pusat Statistik Provinsi Papua Barat, 2014
iv + 76 halaman; 17,6 x 25 cm

Kata Pengantar



Survei Pendapatan Rumah Tangga Usaha Pertanian tahun 2013 (SPP 2013) merupakan rangkaian kelanjutan kegiatan Sensus Pertanian 2013 (ST 2013). Publikasi Analisis Sosial Ekonomi Petani di Provinsi Papua Barat ini disusun berdasarkan hasil kegiatan SPP 2013.

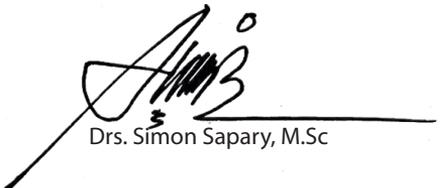
Dalam publikasi ini akan diperoleh gambaran kondisi sosial ekonomi rumah tangga usaha pertanian meliputi karakteristik rumah tangga, struktur penguasaan, sisi kesejahteraan rumah tangga usaha pertanian dan ketahanan pangan wilayah. Untuk memberikan gambaran lengkap tentang kondisi sosial ekonomi rumah tangga usaha pertanian di Papua Barat, selain ulasan analisis disajikan juga tabel, grafik dan peta GIS pendukungnya. Publikasi ini akan melengkapi dan memperkaya hasil analisis publikasi-publikasi sebelumnya yang berkaitan dengan Sensus Pertanian 2013.

Pada akhirnya, kami berharap semoga publikasi ini bermanfaat bagi pengguna data secara luas khususnya bagi usaha pembangunan pertanian di Papua Barat.

Kami mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya atas bantuan semua pihak baik secara langsung maupun tidak langsung yang telah ikut berpartisipasi dalam mensukseskan ST 2013 dan kegiatan SPP 2013.

Manokwari, Desember 2014

Kepala Badan Pusat Statistik
Provinsi Papua Barat



Drs. Simon Sapary, M.Sc

Daftar Isi

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
1. Papua Barat Masih Wilayah Agraris	1
A. Peranan Sektor Pertanian dalam Perekonomian Papua Barat	2
B. Kesejahteraan Petani Papua Barat	5
C. Sejuta Harapan di Balik Seribu Tantangan	7
2. Siapa dan Bagaimana Petani Papua Barat	9
A. Karakteristik Rumah Tangga Usaha Pertanian	10
B. Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) Di Sektor Pertanian	14
3. Lahan Pertanian, Isu Hangat Yang Dianggap Dingin	16
A. Petani Papua Barat, Tuan Tanah atau Gurem?	17
4. Sumber Daya Produktif Bukan Tak Terjangkau	21
A. Akses Terhadap Permodalan	22
B. Akses Terhadap Kelembagaan	25
C. Akses Terhadap Sarana Produksi	27
5. Rumah Tangga Pertanian dan Ancaman Kemiskinan	31
A. Tanaman Bahan Makanan Sang Primadona	32
B. Tingkat dan Intensitas Kemiskinan Petani	34
C. Kemiskinan Multidimensi	39
6. Ketahanan Pangan Rumah Tangga Usaha Pertanian	41
A. Kekhawatiran Akan Kekurangan Pangan	42
B. Petani Papua Barat Mampu Menjangkau dan Memanfaatkan Pangan	44
C. Ketahanan Pangan Yang Masih Tertinggal	46
7. Kesimpulan	48
A. Kesimpulan	49
DAFTAR PUSTAKA	53
LAMPIRAN	54
CATATAN TEKNIS	58

Daftar Tabel

No	Judul Tabel	Hal
2.1	Karakteristik Rumah Tangga Usaha Pertanian, 2003-2013	11
2.2	Karakteristik Anggota Rumah Tangga Usaha Pertanian, 2013	13
2.3	Karakteristik Petani di Papua Barat, 2013	15
3.2	Persentase Lahan Pertanian Menurut Status Kepemilikan Daerah dan Luas Lahan yang Dimiliki 2013	19
4.1	Persentase RTUP Menerima Bantuan Kredit Bank Berdasarkan Sumber Pendapatan Utama dan Kelompok Rata-rata Pendapatan per Bulan, 2013 (%)	23
4.2	Persentase Rumah Tangga Usaha Pertanian yang Mengalami Kesulitan Mengajukan Kredit Menurut Sumber Pendapatan Utama, 2013 (%)	24
4.3	Persentase Rumah Tangga Usaha Pertanian yang Memperoleh Bantuan/Hibah/ Subsidi Menurut Sumber Pendapatan Utama, 2013 (%)	25
4.4	Persentase Rumah Tangga Usaha Pertanian Menurut Akses Kelembagaan dan Sumber Pendapatan Utama, 2013 (%)	26
4.5	Persentase Rumah Tangga Usaha Pertanian yang Kesulitan Akses Sarana Produksi Dan Menjual Hasil Pertanian, 2013 (%)	27
4.6	Persentase Rumah Tangga Usaha Pertanian Menurut Alasan Utama Kesulitan Akses Sarana Produksi Dan Sumber Pendapatan Utama, 2013 (%)	29
4.7	Persentase Rumah Tangga Usaha Pertanian Menurut Alasan Utama Kesulitan Menjual Hasil Pertanian Dan Sumber Pendapatan Utama, 2013 (%)	29
5.1	Persentase Rumah Tangga Usaha Pertanian menurut Kecukupan Pendapatan dan Sumber Pendapatan Utama, 2013(%)	34
5.2	Persentase RTUP Menurut Sumber Pendapatan Utama dan Kategori Kemiskinan Multidimensional, 2013 (%)	36
5.3	Persentase RTUP Menurut Kelompok Rata-Rata Pendapatan per Bulan dan Kategori Kemiskinan Multidimensional, 2013 (%)	37
5.4	Persentase RTUP Menurut Luas Lahan dan Kategori Kemiskinan Multidimensional, 2013 (%)	37
6.1	Persentase Rumah Tangga Usaha Pertanian menurut Dimensi Ketersediaan Pangan, 2013 (%)	43
6.2	Persentase Rumah Tangga Usaha Pertanian menurut Dimensi Keterjangkauan Pangan, 2013 (%)	44
6.3	Persentase Rumah Tangga Usaha Pertanian menurut Dimensi Pemanfaatan Pangan, 2013 (%)	45

Daftar Gambar

No	Judul Gambar	Hal
1.1	Distribusi PDRB (dengan Migas) dan Presentase Tenaga Kerja Sektor Pertanian, 2009-2013	3
1.2	Distribusi PDRB (dengan Migas) dan Presentase Tenaga Kerja Menurut Lapangan Usaha, 2013	4
1.3	Produktivitas Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah/Tenaga Kerja), 2013	5
1.4	Nilai Tukar Petani Menurut Subsektor, 2013	7
2.1	Jumlah Rumah Tangga Pertanian, ST2003 dan ST2013	10
2.2	Peta Sebaran Rumah Tangga Usaha Pertanian, ST2013	11
2.3	Presentase Petani Berdasarkan Tingkat Pendidikan, 2013	15
3.1	Jumlah Rumah Tangga Usaha Pertanian Menurut Golongan Luas Lahan yang Dikuasai, ST2003 dan ST2013	17
3.2	Perbandingan Rumah Tangga Pertanian Pengguna Lahan dan Petani Gurem, ST2013	18
3.2	Presentase Rumah Tangga Pertanian Menurut Lahan yang Dikuasai dan Kelompok Pendapatan dari Sektor Pertanian, ST2013	20
4.1	Persentase Rumah Tangga Usaha Pertanian Menurut Akses Kelembagaan dan Kategori Rata-Rata Pendapatan per Bulan, 2013 (%)	27
4.2	Persentase Rumah Tangga Usaha Pertanian yang Kesulitan Akses Sarana Produksi Dan Menjual Hasil Pertanian Menurut Kategori Rata-Rata Pendapatan per Bulan, 2013 (%)	28
5.1	Persentase RTUP Menurut Sumber Pendapatan Utama dan Kabupaten/Kota, 2013 (%)	33
5.2	Persentase Rumah Tangga Usaha Pertanian Menurut Kabupaten/Kota dan Kategori Kemiskinan Multidimensional, 2013 (%)	38
5.3	Rata-rata Kekurangan Rumah Tangga Usaha Pertanian yang Miskin Multidimensional Menurut Kabupaten/Kota, 2013 (%)	39
5.4	Indeks Kemiskinan Multidimensi (IKM) Menurut Kabupaten/Kota, 2013 (%)	40
6.1	Indeks Ketahanan Pangan (IKP) Menurut Kabupaten/Kota, 2013 (%)	47



PAPUA BARAT MASIH WILAYAH AGRARIS



BAB 1

Papua Barat Masih Wilayah Agraris

“Produksi dari sektor pertanian selalu terkait dengan pangan yang merupakan kebutuhan mendasar bagi rakyat.”



A. Peranan Sektor Pertanian dalam Perekonomian Papua Barat

Bagi setiap negara, pembangunan sektor pertanian tetap diperhatikan dan diutamakan. Produksi dari sektor pertanian selalu terkait dengan pangan yang merupakan kebutuhan mendasar bagi rakyat. Masalah pangan sangat berpengaruh pada multi dimensional ipoleksosbudhankam (ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan).

Umumnya krisis dalam suatu negara akibat krisis ekonomi, dan krisis ekonomi biasanya dipengaruhi oleh krisis pangan. Kelangkaan pangan bisa berakibat fatal, dan biasanya dapat mengguncang stabilitas perekonomian suatu negara. Peningkatan produksi pangan harus terus diupayakan berkesinambungan agar ketahanan pangan dan stabilitas negara tetap terjaga.

Salah satu kegiatan yang mendukung untuk perencanaan dan evaluasi ketahanan pangan adalah dengan menyediakan data pertanian baik melalui sensus maupun survei. Sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik, penyelenggaraan sensus di Indonesia dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) setiap 10 tahun sekali.

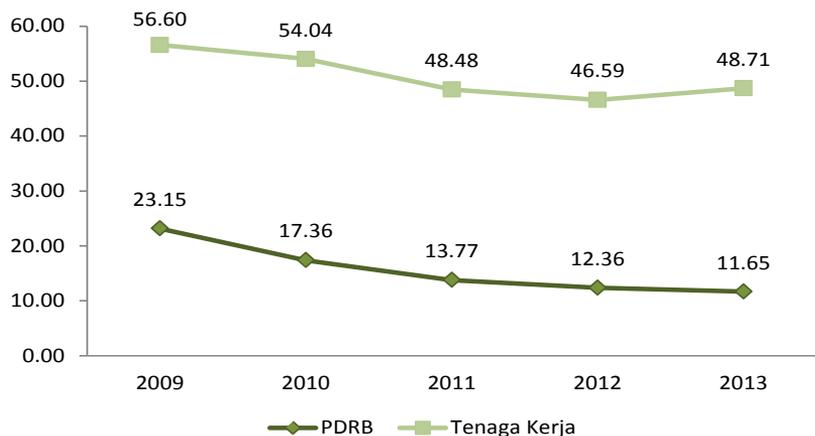
Sensus Pertanian (ST) di Indonesia dilakukan sejak tahun 1963, dan pada tahun 2013 adalah yang keenam kalinya. Tema yang diangkat pada ST2013 adalah “Menyediakan Informasi untuk Masa Depan Petani yang Lebih Baik”. ST2013 merupakan data strategis bagi Papua Barat, karena sektor pertanian merupakan sektor dominan setelah sektor industri. Sektor pertanian mampu menyerap tenaga kerja yang cukup banyak. Sebagai kelanjutan kegiatan ST2013 adalah Survei Pendapatan Rumah Tangga Usaha Pertanian (SPP) yang dilakukan pada tahun 2014. Tujuan SPP adalah untuk mengetahui:

1. Kondisi demografi dan kegiatan anggota rumah tangga petani ;
2. Sumber pendapatan/penerimaan rumah tangga petani baik dari sektor pertanian, non pertanian maupun pendapatan/penerimaan lainnya;
3. Luas penguasaan, penggunaan, konversi dan mutasi lahan baik lahan pertanian maupun lahan bukan pertanian;
4. Stuktur faktor produksi dan pendapatan masing-masing sektor meliputi tanaman padi dan palawija, hortikultura, perkebunan, kehutanan, ternak/ unggas dan kehutanan;
5. Keadaan sosial ekonomi dan ketahanan pangan rumah tangga petani.

Untuk mengupas persoalan pertanian yang kompleks, data SPP sangat bermanfaat. Dari data tersebut akan diperoleh informasi kondisi sosial ekonomi petani saat ini, melengkapi data-data yang diperoleh dari hasil Sensus Pertanian 2013. Pemerintah Daerah juga bisa mengambil manfaatnya, menggunakan data SPP sebagai referensi untuk mengevaluasi sampai sejauh mana program-program pertaniannya bisa berjalan efektif dan dirasakan oleh masyarakat petani.

Permasalahan sedang dihadapi Papua Barat yaitu dalam lima tahun terakhir share atau kontribusi pertanian pada pembentukan PDRB Papua Barat cenderung mengalami pelemahan. Padahal Papua Barat memiliki potensi wilayah dan keadaan alam yang sangat baik untuk mengembangkan sektor pertanian. Kontribusi pertanian pada tahun 2009 tercatat sebesar 23,15 persen menurun terus hingga pada tahun 2013 berkisar 11,65 persen.

Melemahnya kontribusi sektor pertanian pada PDRB ini juga diikuti pelemahan kontribusi jumlah tenaga kerja yang bekerja. Pada tahun 2009 kontribusi tenaga kerja di sektor pertanian mencapai 56,60 persen, menurun terus setiap tahun hingga tercatat sebesar 48,71 persen di tahun 2013. Semakin melemahnya kontribusi pertanian baik dari PDRB yang dihasilkan maupun jumlah tenaga kerjanya, cukup memprihatinkan. Hal ini dikarenakan sektor pertanian merupakan sektor memberikan kontribusi terbesar kedua dalam pembentukan PDRB dan mampu menyerap tenaga kerja yang terbanyak dibanding sektor-sektor lainnya.



Gambar 1.1

Distribusi PDRB (dengan Migas) dan Presentase Tenaga Kerja Sektor Pertanian, 2009-2013

Sumber : BPS Provinsi Papua Barat ,2009-2013

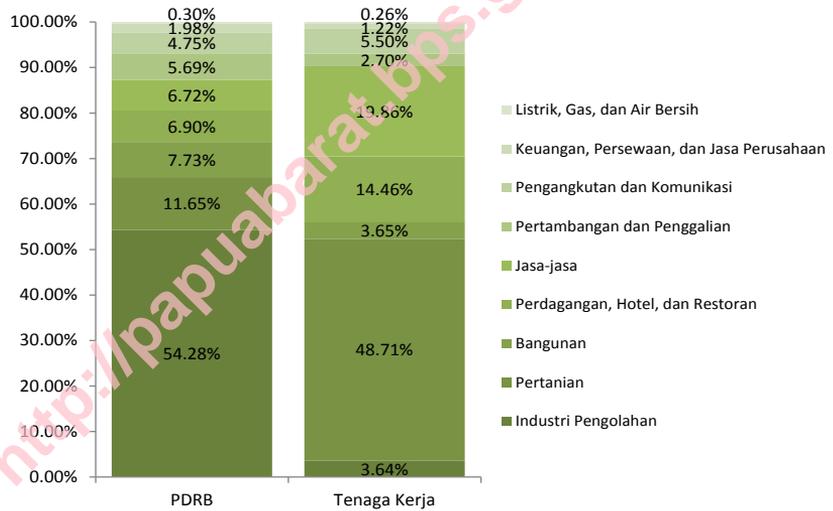
Kontribusi sektor pertanian di tahun 2013 (11,65) berada di posisi kedua di bawah industri pengolahan (54,28 persen). Kontribusi sektor pertanian pada tahun 2013 utamanya disumbang oleh usaha perikanan dengan kontribusi sebesar 37,06 persen. Memang usaha perikanan merupakan yang paling dominan dibanding usaha pertanian lainnya (tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, dan jasa pertanian).

Berbeda dengan PDRB, dari sisi kontribusi tenaga kerja, pertanian memberikan kontribusi terbesar. Ini mengindikasikan bahwa produktivitas di pertanian relatif rendah dibanding sektor lainnya, dan menjadi salah satu penyebab mengapa sektor pertanian semakin ditinggal oleh tenaga kerjanya. Pada tahun 2013 tercatat pertanian mampu menyerap tenaga kerja 48,71 persen, jauh lebih tinggi dibanding sektor unggulan lainnya yaitu industri pengolahan yang hanya mampu menyerap 3,64 persen dari total tenaga kerja yang bekerja di Papua Barat.

“Sektor Pertanian menyerap tenaga kerja paling besar, akan tetapi memberi kontribusi relatif rendah ke perekonomian Provinsi Papua Barat”

Gambar 1.2

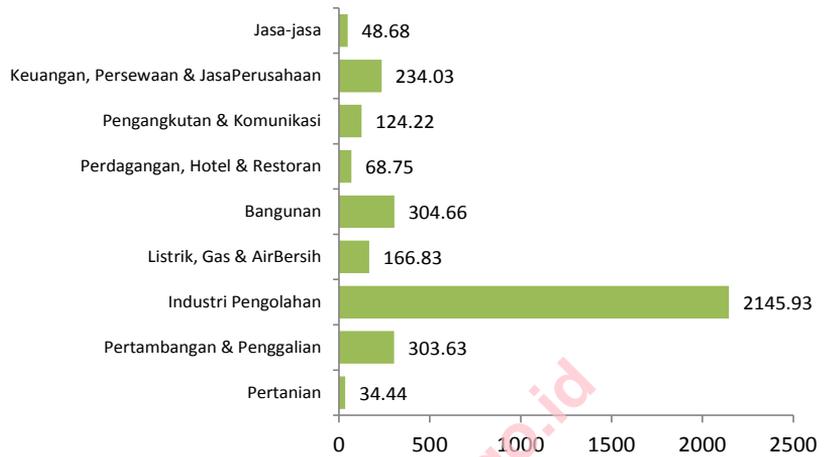
Distribusi PDRB (dengan Migas) dan Presentase Tenaga Kerja Menurut Lapangan Usaha 2013



Sumber : BPS Provinsi Papua Barat ,2013

Jika berkurangnya tenaga kerja di sektor pertanian ini dapat ditampung di sektor lainnya, maka yang terjadi adalah perpindahan profesi. Sebaliknya jika tidak dapat ditampung, maka akan menimbulkan masalah baru antara lain naiknya angka pengangguran dan kemiskinan. Kondisi yang kedua ini sangat mungkin terjadi, mengingat untuk berpindah profesi ke sektor lain bergantung kepada sumber daya manusia petani yang biasanya memerlukan tamatan jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

Persoalan lain yang akan timbul, jika banyak tenaga kerja terdidik yang berpindah dari pertanian ke sektor lainnya, maka kontribusi pertanian semakin melemah dan produktivitasnya semakin menurun, mengingat sumber daya manusia yang tersisa adalah rata-rata berpendidikan rendah. Dibanding sektor-sektor lainnya, produktivitas pertanian adalah terendah. Pada tahun 2013, pertanian mempunyai produktivitas sebesar Rp. 34,44 juta per tenaga kerja, sangat jauh dibanding sektor industri pengolahan (Rp. 2145,93 juta), konstruksi (304,66 juta), dan pertambangan dan penggalian (Rp. 303,63 juta).



Gambar 1.3

Produktivitas Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah/Tenaga Kerja)

2013 Sumber : BPS Provinsi Papua Barat , 2013

“Dibanding sektor-sektor lainnya, produktivitas pertanian adalah terendah. Selain biaya produksi dan balas jasa faktor produksi yang menjadi kendala utama, hama dan bencana juga menghantui usaha pertanian”

Selain biaya produksi dan balas jasa faktor produksi yang menjadi kendala utama, faktor lainnya seperti hama dan bencana juga menghantui usaha pertanian. Permasalahan yang cukup banyak di pertanian, menyebabkan sektor ini lambat laun semakin tidak diminati. Apalagi upah buruh di sektor pertanian sangat rendah, atau mempunyai rata-rata Rp. 1,3 juta setahun, jauh di bawah rata-rata upah buruh di sektor non pertanian Rp. 7,7 juta. Maka sangat wajar jika banyak ditemui kantong-kantong kemiskinan di daerah perdesaan yang berbasis pertanian.

Penyerapan tenaga yang cukup besar tadi, lebih dikarenakan sumber daya manusia (SDM) yang bekerja di sektor pertanian kalah bersaing dengan sektor lainnya. Keterpaksaan karena kualitas SDM yang terbatas, menjadikan pertanian sebagai tujuan utama untuk bekerja. Meskipun mengetahui balas jasa atau produktivitas pertanian sangat rendah, mereka yang tidak mempunyai SDM cukup, mau menggeluti pekerjaan bertani untuk bertahan hidup.

B. Kesejahteraan Petani Papua Barat

Bila membandingkan jasa petani dan kesejahteraan petani ternyata akan diperoleh kesimpulan bahwa jasa petani berbanding terbalik dengan kesejahteraannya. Dalam kaitan jasa petani, upaya ketahanan pangan dan kedaulatan pangan tidak akan berhasil tanpa bantuan tangan para petani. Jika ketahanan dan kedaulatan pangan tercapainya, dipastikan suatu wilayah tersebut masyarakatnya makmur dan sejahtera, stabil dari goncangan ekonomi. Jadi bisa dibayangkan betapa besarnya jasa petani bagi kemakmuran suatu wilayah.

Kondisi sebaliknya jika bicara masalah kesejahteraan petani. Kenyataannya, produktivitas dan upah buruh petani sangat rendah. Alasan ini yang menyebabkan banyak dijumpai penduduk miskin yang berusaha atau bekerja di sektor pertanian. Sekitar 35 persen dari total penduduk perdesaan di Papua Barat merupakan penduduk miskin dimana umumnya bekerja di sektor pertanian. Meskipun persentase pada tahun 2012 memang lebih rendah dari tahun sebelumnya, tetapi tetap disebut dominan, persentase penduduk miskin di perdesaan lebih tinggi enam kali lipat dari persentase penduduk miskin di perkotaan.

Komposisi jumlah pekerja di sektor non pertanian yang meningkat dan jumlah pekerja di sektor pertanian yang menurun pada kategori rumah tangga miskin dalam kurun lima tahun terakhir, menguatkan paradigma bahwa pergeseran atau alif profesi dari pertanian ke non pertanian memang sudah terjadi di Papua Barat. Kejenuhan sebagai penduduk miskin di sektor pertanian, menggerakkan hati mereka untuk mencoba mengadu nasib di sektor lain yang diyakini lebih menjanjikan.

Jika dilihat lebih lanjut, terdapat 10 kabupaten di Papua Barat yang mempunyai penduduk miskin yang bekerja di sektor pertanian lebih dari 50 persen, yaitu Kabupaten Fakfak (56,5 persen), Kaimana (86,5 persen), Teluk Wondama (76,3 persen), Teluk Bintuni (56,4 persen), Manokwari (81,7 persen), Sorong Selatan (84,6 persen), Kabupaten Sorong (75,4 persen), Tambrauw (87,5) dan Maybrat (81,1 persen). Sedangkan Kota Sorong hanya memiliki 25,6 persen penduduk miskin yang bekerja di sektor pertanian, tentunya hal ini sejalan dengan karakteristik Kota Sorong yang mayoritas penduduknya bukan bekerja di sektor pertanian. Secara agregat maka presentase penduduk miskin di Papua Barat yang bekerja di sektor pertanian sebesar 76,1 persen.

Melihat realita melemahnya sektor pertanian, Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat dalam upaya mengembalikan kejayaan sektor pertanian, telah berupaya keras membantu peningkatan kesejahteraan petani melalui berbagai program pembangunan pertanian. Program sosialisasi dengan gencar tentang penggunaan bibit unggul yang tahan hama dan cuaca bagi petani. Pemerintah sendiri bersama stakeholder ikut andil dalam upaya menekan harga-harga barang-barang yang dibutuhkan petani khususnya pupuk dan pestisida bisa stabil dan terjangkau hingga petani pelosok.

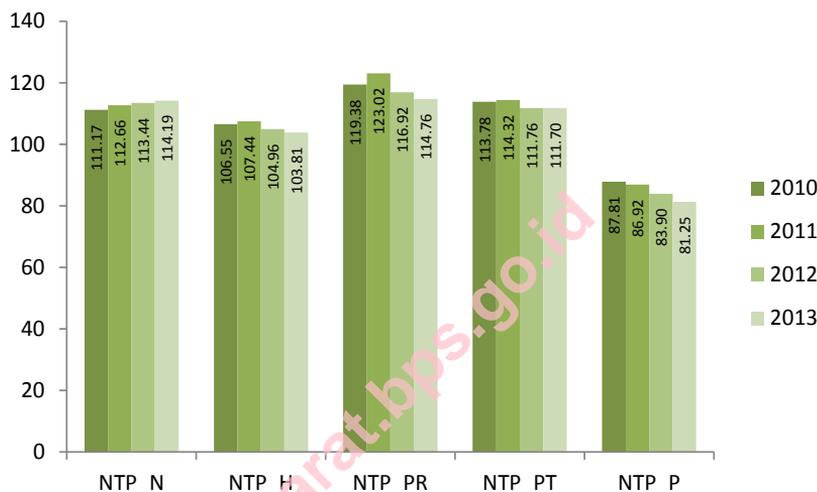
Dalam kurun waktu 2010-2012 terakhir, upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan petani mulai nampak. Nilai tukar petani (NTP) 2010-2012 tercatat di atas 100. Namun pada tahun 2013, NTP tercatat di bawah 100 yaitu 99,64. Indeks yang diterima petani pada tahun 2013 sebesar 136,67 sedangkan indeks yang dibayar petani sebesar 137,17. Tentunya hal ini bisa menjadi acuan pemerintah untuk mengevaluasi lebih lanjut program-program di sektor pertanian sehingga kedepannya kesejahteraan petani bisa kembali membaik.

Meskipun indeks yang diterima petani lebih besar dibanding indeks yang dibayar bukan secara otomatis menunjukkan petani sudah sejahtera. Kesejahteraan petani akan terasa nyata jika pendapatan yang diterima bisa dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan dasar atau pendapatannya di atas garis kemiskinan. Jadi meskipun NTP sudah di atas 100, tetapi kalau pendapatan yang didapat dari hasil pertanian berada di bawah garis kemiskinan, maka tetap saja petani belum sejahtera. Setidaknya, dari angka NTP dapat diperoleh informasi awal sejauh mana petani bisa memanfaatkan hasil pertaniannya dibanding total kebutuhan hidup. Umumnya NTP di atas 100 mengindikasikan petani mengalami perbaikan kualitas hidup.

Jika dibandingkan dengan angka tahun sebelumnya, capaian tahun 2013 lebih rendah. NTP tahun 2013 turun 1,98 persen dibanding tahun 2012 yang mencapai 101,62. Penurunan ini karena laju indeks yang dibayar petani lebih cepat dibanding laju indeks yang diterima petani. Tentunya penurunan ini masih terkait adanya faktor inflasi, perlu melihat kembali perubahan hasil produksi sehingga dapat diketahui



dengan pasti apakah perubahan NTP itu berpengaruh pada kualitas hidup petani. Maka menjaga kestabilan harga itu adalah sangat penting khususnya berbagai barang dan jasa yang dibutuhkan bagi petani. Jika penurunan NTP itu dipengaruhi inflasi dan menurunnya nilai produksi, maka penurunan NTP tersebut bisa menjadi gambaran menurunnya kualitas hidup bagi petani.



Gambar 1.4
 Nilai Tukar Petani Menurut Subsektor, 2013
 Sumber : BPS Provinsi Papua Barat, 2013

Kondisi tahun 2013 usaha perkebunan rakyat sebagaimana tahun sebelumnya mempunyai NTP tertinggi dibanding usaha pertanian lainnya walaupun trend nya menurun selama kurun dua tahun terakhir. NTP perkebunan rakyat (NTP_PR) mencapai nilai tertinggi pada tahun 2011 yaitu sebesar 123,02 persen. Pada kurun waktu 2010-2013 hanya nilai NTP usaha perikanan (NTP_N) yang mengalami peningkatan nilai yaitu dari 111,17 di tahun 2010 hingga mencapai 114,19 di tahun 2013. Hal yang cukup memprihatinkan ada di NTP usaha tanaman pangan (NTP_P), selama kurun waktu 2010-2013 nilai NTP selalu berada di bawah 100.

Kondisi tersebut tentunya harus menjadi perhatian pemerintah, jika kualitas hidup petani usaha tanaman pangan masih rendah tentunya secara tidak langsung akan mempengaruhi produksi tanaman pangan. Menurunnya produksi tanaman pangan khususnya untuk wilayah Papua Barat akan semakin meningkatkan impor komoditi tanaman pangan. Tentunya hal tersebut akan mengakibatkan kerentanan dalam ketahanan pangan Papua Barat.

C. Sejuta Harapan di Balik Seribu Tantangan

Meningkatkan pertanian di Papua Barat bukan suatu perkara yang mudah. Semakin menurunnya kontribusi dalam perekonomian Papua Barat mengindikasikan banyak tantangan atau kendala yang dimiliki sektor pertanian untuk berkembang.

Maka yang menjadi pertanyaan besar, mungkinkah Papua Barat dengan wilayah alam yang luas dan subur dapat menjadikan sektor pertanian sebagai primadona dan mungkinkah Papua Barat dapat menyandang predikat sebagai lumbung nasional untuk tahun-tahun mendatang? Lebih dalam lagi, hingga berapa tahun lagi Papua

"Mungkinkah Papua Barat dengan wilayah alam yang luas dan subur dapat menjadikan sektor pertanian sebagai primadona?"



Barat mampu mencapai kedaulatan pangan dan semakin menarik sektor pertanian ke depan?

Melihat betapa besar peranan nyata pertanian dalam perekonomian Papua Barat dan begitu besarnya penyerapan tenaga kerja di sektor ini, sangat disayangkan kalau kontribusinya semakin menurun dari tahun ke tahun. Sejuta harapan untuk kembali bangkitnya sektor pertanian sangat diimpikan dibalik seribu tantangan di dalamnya.

Harapan mengembalikan kebangkitan pertanian di Papua Barat tidak mustahil terealisasi, jika pemerintah dapat memberikan solusi terhadap banyaknya kendala di sektor pertanian. Kualitas sumber daya manusia yang bergerak di sektor ini perlu ditingkatkan. Pendidikan petani perlu ditingkatkan agar petani lebih mudah mempelajari hal-hal yang baru dan siap menerima modernisasi pertanian. Dengan pendidikan yang baik, produk pertanian akan mempunyai daya saing yang tidak kalah dengan produk luar negeri, dan akan membawa peningkatan pendapatan usaha pertanian.

Akses ke sumber daya produktif juga harus diperbaiki dan mudah bagi petani. Permodalan, kredit, subsidi benih, pupuk dan alat-alat pertanian harus bisa dirasakan oleh petani hingga pelosok. Pemerintah juga harus merevitalisasi sarana dan infrastruktur pertanian yang sangat dibutuhkan petani, termasuk membantu pemasaran produk pertanian. Melalui kebijakan ekonominya, Pemerintah harus melindungi hasil produk pertanian dari serangan produk impor hasil pertanian negara lain.

Masyarakat sendiri juga memberikan andil yang sangat besar bagi kemajuan pertanian. Kebiasaan untuk menggunakan produk pertanian lokal sangat menguntungkan petani domestik. Jika itu dilakukan, maka pangsa pasar produk pertanian impor akan tersingkir dengan sendirinya. Sebaliknya jika masyarakat lebih menyukai produk pertanian impor, maka akan merugikan petani lokal dan penurunan kontribusi pertanian lokal tidak terelakkan.

2

SIAPA DAN BAGAIMANA PETANI PAPUA BARAT



BAB 2

Siapa dan Bagaimana Petani Papua Barat

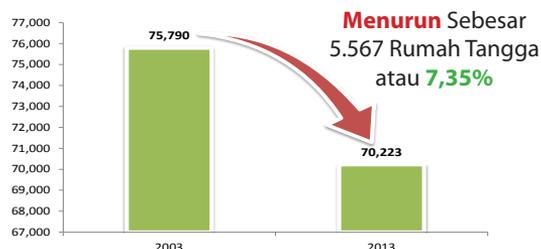
“Berdasarkan hasil ST2013, Rumah Tangga Usaha Pertanian Papua Barat menurun dibandingkan tahun 2003”



A. Karakteristik Rumah Tangga Usaha Pertanian

Peranan klasik dari sektor pertanian dalam perekonomian Papua Barat adalah sebagai penyedia pangan serta mewujudkan stabilitas pangan. Selain sebagai penyedia kebutuhan pangan, peran strategis sektor pertanian lainnya yang tak kalah penting adalah sektor ini menjadi penyedia bahan baku bagi sektor lainnya khususnya sektor industri makanan dan minuman. Dari faktor tenaga kerja, sektor ini banyak menyerap tenaga kerja terutama tenaga kerja pedesaan. Namun berdasarkan hasil ST 2013 dalam kurun waktu 10 tahun terakhir ini, jumlah rumah tangga usaha pertanian Papua Barat menurun. Mengingat betapa pentingnya sektor pertanian, dukungan berbagai pihak melalui kebijakan proaktif pra dan pasca panen untuk peningkatan produktivitas pertanian sangat dibutuhkan.

Hasil ST2013 menunjukkan bahwa usaha pertanian di Provinsi Papua Barat didominasi oleh rumah tangga. Hal ini tercermin dari besarnya jumlah rumah tangga usaha pertanian jika dibandingkan dengan perusahaan pertanian berbadan hukum atau pelaku usaha lainnya yaitu selain rumah tangga dan perusahaan pertanian berbadan hukum. Jumlah rumah tangga usaha pertanian di Provinsi Papua Barat Tahun 2013 tercatat sebanyak 70.223 rumah tangga, menurun sebesar 7,35 persen dari tahun 2003 yang tercatat sebanyak 75.790 rumah tangga. Sedangkan jumlah perusahaan pertanian berbadan hukum Tahun 2013 tercatat sebanyak 41 perusahaan dan pelaku usaha lainnya sebanyak 30 unit.



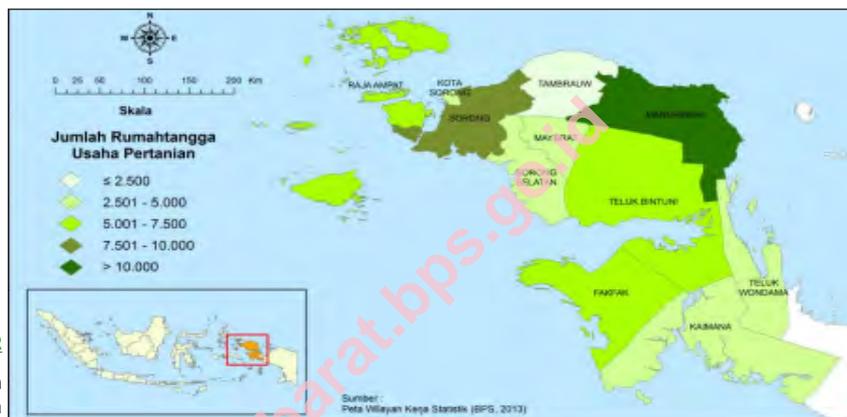
Gambar 2.1

Jumlah Rumah Tangga Pertanian

ST2003 dan ST2013 Sumber : Hasil Olah ST2013

"Kabupaten Manokwari memiliki jumlah rumah tangga usaha pertanian terbanyak di tahun 2013, yaitu sebanyak 21.314 rumah tangga."

Berdasarkan hasil ST2013, kabupaten Manokwari tercatat sebagai kabupaten dengan jumlah rumah tangga usaha pertanian terbanyak di tahun 2013, yaitu sebanyak 21.314 rumah tangga. Sedangkan pada periode yang sama, Kota Sorong tercatat sebagai kabupaten dengan jumlah perusahaan pertanian berbadan hukum terbanyak dan Kabupaten Fakfak tercatat sebagai kabupaten dengan jumlah usaha pertanian lainnya terbanyak. Penurunan jumlah rumah tangga usaha pertanian terbesar terjadi di Kabupaten Manokwari, dengan pertumbuhan jumlah rumah tangga usaha pertanian sebesar 18,85 persen.



Gambar 2.2

Peta Sebaran Rumah Tangga Usaha Pertanian, ST2013

Sumber: Hasil Olah ST2013



No	Karakteristik	Satuan	2003	2013
1	Jumlah RTUP	RT	75 790	70 233
2	Kepala RTUP			
	Laki-laki	%	-	92,01
	Perempuan	%	-	7,99
3	Rata-rata jumlah anggota RT	Orang		4,55
4	Rasio ketergantungan	-	-	67,11
5	Rata-Rata penguasaan lahan pertanian per RT	Ha	0,48	0,73
6	Presentase RTUP pengguna lahan yang menguasai lahan pertanian <0,5 Ha	%	51,91	53,50
7	RTUP menurut sumber pendapatan utama:			
	Pertanian	%	-	72,18
	Bukan Pertanian	%	-	27,82
8	Presentase RTUP menurut share pendapatan dari sektor pertanian:			
	Kurang dari 25%	%	-	30,42
	25% s/d 50%	%	-	24,99
	Di atas 50%	%	-	44,59
9	Rata-Rata Pendapatan RTUP menurut sumber pendapatan utama			
	Pertanian	Ribu Rp/Tahun	-	16 963,13
	Bukan Pertanian	Ribu Rp/Tahun	-	20 721,94
10	Rata-rata pendapatan per kapita RTUP	Ribu Rp/Tahun	-	8 115,06

Tabel 2.1

Karakteristik Rumah Tangga Usaha Pertanian, 2003-2013

Sumber: Hasil Olah ST dan SPP 2013

“Rumah tangga usaha pertanian di Papua Barat bersandarkan kehidupannya dari pertanian atau mempunyai pendapatan utama dari sektor pertanian”



Dari sisi jenis kelamin, kepala rumah tangga yang salah satu anggota rumah tangganya berusaha di sektor pertanian sangat dominan berjenis kelamin laki-laki atau sebanyak 92,01 persen. Di Papua Barat, umumnya pekerja dalam mencari nafkah untuk rumah tangga adalah seorang ayah atau anggota rumah tangga laki-laki yang dianggap mampu memenuhi kebutuhan hidup. Sosok ibu masih diposisikan sebagai ibu rumah tangga atau seorang yang mengelola nafkah yang didapat dari suaminya dan tugasnya cukup mengurus kebutuhan anak. Namun demikian, dari seluruh kepala rumah tangga pertanian, dijumpai sekitar 7,99 persen kepala rumah tangga berjenis kelamin perempuan. Biasanya kepala rumah tangga tani yang berjenis kelamin perempuan adalah seorang yang berstatus janda baik cerai mati maupun cerai hidup.

Rata-rata jumlah anggota keluarga petani sebesar 4,55 orang dengan rasio ketergantungan sebesar 67,11. Ini mengartikan bahwa perkembangan jumlah anggota rumah tangga saat ini masih belum mencapai kondisi yang ideal (ayah, ibu dan 2 orang anak), sementara dari rasio ketergantungan diperoleh informasi bahwa dari 100 petani yang produktif menanggung 67 anggota keluarga yang tidak produktif meliputi anak usia 0 – 15 tahun dan usia renta 65 tahun ke atas.

Dibandingkan sepuluh tahun yang lalu, rata-rata penguasaan lahan pertanian di tahun 2013 sebesar 0,73 Ha atau naik 52 persen dibanding hasil ST2003. Dengan semakin berkurangnya jumlah rumah tangga tani, diduga naiknya rata-rata penguasaan lahan pertanian ini karena semakin banyak tanah yang tidak dimanfaatkan pemilik lahan dan kemudian disewa atau dibeli oleh petani yang masih produktif. Presentase RTUP yang menguasai lahan di bawah 0,5 Ha juga mengalami peningkatan dalam 10 tahun terakhir. Pada tahun 2013, terdapat 53,50 persen RTUP yang menguasai lahan di bawah 0,5 Ha meningkat dari tahun 2003 (51,91 persen). Hal ini juga dapat mengindikasikan adanya peningkatan RTUP yang menguasai lahan yang mungkin disewa atau dibeli oleh pemilik lahan lain namun rata-rata luas lahan tersebut di bawah 0,5 Ha.

Rumah tangga usaha pertanian di Papua Barat yang bersandarkan kehidupannya benar-benar dari pertanian atau yang mempunyai pendapatan utama (terbesar) dari pertanian sebanyak 72,17 persen. Sementara sisanya, meskipun ada anggota rumah tangga yang berusaha di sektor pertanian, tetapi pendapatan utama atau yang terbesar berasal dari usaha non pertanian (27,83 persen).

Sebanyak 30,42 persen rumah tangga usaha pertanian yang mempunyai share pendapatan hasil pertaniannya kurang dari 25 persen dari seluruh pendapatan rumah tangganya. Ini mengindikasikan bahwa pendapatan dari hasil pertanian memang sangat rendah dan untuk memenuhi kebutuhan lainnya dibantu dari pendapatan sektor non pertanian. Sedangkan rumah tangga yang mengaku bahwa share pendapatan dari usaha pertanian di atas 50 persen dari seluruh pendapatannya sebanyak 44,59 persen dari total rumah tangga usaha pertanian. Sisanya sebanyak 24,99 persen, mengaku bahwa dari hasil pertanian mempunyai share pendapatan rumah tangga antara 25 – 50 persen. Kenyataan ini memberikan gambaran bahwa ternyata tidak sedikit anggota rumah tangga usaha pertanian bekerja di luar sektor pertanian untuk membantu kehidupan keluarganya.

Bagi rumah tangga usaha pertanian, mengandalkan usaha dari pertanian saja tidak cukup. Hal ini diperkuat dari data rata-rata pendapatan yang dihasilkan dari pertanian sebagai lapangan/usaha utama rumah tangga sebesar 16,9 juta rupiah per tahun, lebih rendah dibanding pendapatan dari sektor lainnya (sebesar 20,7 juta rupiah per tahun). Dari data tersebut, diketahui bahwa rata-rata pendapatan per kapita per tahun untuk rumah tangga usaha pertanian sebesar 8,1 juta rupiah (termasuk pendapatan yang berasal dari sektor non pertanian).

"Masih banyaknya tamatan SD di rumah tangga tani menunjukkan bahwa rata-rata SDM rumah tangga yang berusaha di sektor pertanian relatif rendah."



No	Karakteristik	Satuan	2013
1	Struktur Pendidikan ART (> 5 tahun)		
	Tidak Sekolah / SD	%	64,45
	SMP / SMA	%	31,14
	Di atas SMA	%	4,41
2	Angka Partisipasi Sekolah		
	7-12 Tahun	%	93,24
	13-15 Tahun	%	88,05
	16-18 Tahun	%	67,09
3	Presentase ART (> 10 tahun) menurut kegiatan utama		
	Berusaha di sektor pertanian	%	38,93
	Pekerja keluarga/ Pekerja tidak dibayar	%	34,43
	Buruh/pegawai/karyawan/pekerja bebas di sektor pertanian	%	3,26
	Buruh/pegawai/karyawan/pekerja bebas di luar sektor pertanian	%	12,89
4	Presentase pekerja anak (10-17 tahun) terhadap jumlah anak		
	Pekerja anak dibayar	%	9,42
	Pekerja anak tidak dibayar	%	33,79
5	Pendidikan pekerja anak		
	Tidak pernah sekolah	%	3,0
	Masih sekolah	%	87,5
	Tidak sekolah lagi	%	9,5

Tabel 2.2

Karakteristik Anggota Rumah Tangga Usaha Pertanian, 2013

Sumber: Hasil Olah ST dan SPP 2013

Dari sisi pendidikan, rata-rata pendidikan anggota rumah tangga (ART) usaha pertanian didominasi tidak sekolah/ SD atau 64,45 persen. Persentase ini cukup besar karena termasuk anggota rumah tangga yang tidak sekolah dan anggota rumah tangga yang masih sekolah di usia 7-12 tahun (belum tamat SD). Sedangkan jika informasi tersebut dipisah maka ada 34,90 persen ART yang tidak/belum tamat SD dan 29,55 persen ART lulus SD. Masih banyaknya tamatan SD di rumah tangga tani menunjukkan bahwa rata-rata SDM rumah tangga yang berusaha di sektor pertanian relatif rendah. Dari 34,90 persen anggota rumah tangga yang tidak/belum tamat SD itu, kemungkinan besar berasal dari rumah tangga tani yang miskin atau yang tinggal di pelosok jauh dari sarana pendidikan dasar (SD). Pada jenjang pendidikan yang lain, anggota rumah tangga tani yang berpendidikan SMP dan SMA sebanyak 31,14 persen, sedangkan tamatan perguruan tinggi baik diploma maupun sarjana hanya sebesar 4,41 persen.

Angka partisipasi sekolah rumah tangga usaha pertanian usia 7-12 tahun sebesar 93,24 persen. Meskipun hampir semua anak usia sekolah SD (7-12) sedang menjalani pendidikan tetapi masih belum 100 persen, artinya masih ada yang tidak/belum sekolah atau tidak sekolah lagi. Angka partisipasi sekolah SMP (13-15 tahun) lebih rendah daripada jenjang SD atau 88,05 persen, sedangkan pada jenjang SMA (16-18 tahun) semakin rendah lagi yaitu 67,09 persen. Data ini menunjukkan bahwa semakin tinggi jenjang pendidikannya, semakin rendah partisipasi sekolahnya. Selain faktor kemiskinan dan ketimpangan sarana sekolah, diduga faktor budaya juga berpengaruh terhadap menurunnya angka partisipasi sekolah pada jenjang yang lebih tinggi.

“Pekerja anak di Rumah Tangga Pertanian sebesar 43,21 persen. 9,42 persen pekerja anak dibayar dan 33,79 pekerja anak tidak dibayar. Namun walaupun pekerja anak relatif tinggi namun tidak berdampak pada pendidikan pekerja anak.”

Faktor budaya yang menghambat antara lain masih banyaknya rumah tangga yang lebih mementingkan pendidikan informal setelah lulus dari SD. Faktor budaya lainnya, menikahkan anak perempuannya yang sudah mengalami menstruasi (dianggap telah dewasa dan siap membina keluarga), dan budaya mensegerakan bekerja bagi anak laki-laki. Padahal anak-anak usia 7-18 tahun masih membutuhkan sekali hak pendidikan.

Jika dilihat lebih mendalam, pada usia 10-17 tahun (disebut usia anak) terdapat 9,42 persen anak yang sudah bekerja dengan mendapat honor. Bila ditambah dengan anak yang bekerja tanpa dibayar maka jumlahnya adalah 43,21 persen. Mereka ini disebut pekerja anak. Kemungkinan besar karena faktor ekonomi, anak-anak di usia itu ikut bekerja membantu kebutuhan hidup keluarga. Alasan lainnya dikarenakan rata-rata usia petani yang relatif tua (53 persen di atas umur 40 tahun) diduga menjadi salah satu penyebab mengapa dijumpai anak yang sudi menjadi pekerja tidak dibayar (pekerja keluarga) untuk membantu usaha keluarga.

Hal yang masih menggembirakan adalah walaupun pekerja anak relatif tinggi namun tidak berdampak pada pendidikan pekerja anak. Sebesar 87,5 persen pekerja anak masih bersekolah dan hanya 12,5 persen pekerja anak yang tidak pernah sekolah maupun tidak bersekolah lagi. Umumnya semakin tinggi presentase pekerja anak maka akan mengakibatkan semakin tingginya presentase pekerja anak yang tidak bersekolah lagi.

Berdasarkan pekerjaannya, sebanyak 38,93 persen anggota rumah tangga usia 10 tahun ke atas menggeluti usaha pertanian. Pekerja keluarga atau pekerja tidak dibayar diketahui sebanyak 34,43 persen, sedangkan anggota rumah tangga yang bekerja sebagai buruh/pegawai/karyawan/pekerja bebas di sektor pertanian dan non pertanian masing-masing sebesar 3,26 persen dan 12,89 persen. Sisanya adalah yang termasuk bukan angkatan kerja (mengurus rumah tangga, sekolah, tidak beraktifitas) dan yang masih mencari pekerjaan (pengangguran terbuka).

B. Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) Di Sektor Pertanian

Dari hasil ST2013, diketahui bahwa jumlah petani di Papua Barat sebanyak 96,09 ribu orang, terdiri dari petani laki-laki sebanyak 70,78 ribu orang dan petani perempuan 25,31 ribu orang atau mempunyai seks rasio 279. Dari setiap 279 petani laki-laki terdapat 100 petani perempuan atau mempunyai perbandingan 2,79 : 1. Jumlah petani laki-laki di Papua Barat lebih dominan karena kepala rumah tangga pertanian dan pekerja di sektor pertanian umumnya laki-laki. Rasio rata-rata petani per rumah tangga tercatat 1,34 yang mengartikan bahwa dalam setiap rumah tangga usaha pertanian terdapat 1- 2 petani aktif yang melakukan usaha pertanian, tetapi lebih banyak yang bercondisikan satu petani dalam rumah tangga.

Pekerjaan bertani semakin lama tidak mendapatkan hati di kalangan usia muda. Rata-rata umur petani di Papua Barat termasuk golongan tua, yakni 42,05 tahun untuk petani laki-laki dan 39,12 tahun untuk petani perempuan. Ada yang beranggapan bahwa bertani adalah suatu pekerjaan orang kuno (orang desa) turun temurun. Bertani itu identik dengan pekerjaan keluarga miskin di desa, sedangkan yang kaya lebih memilih berdagang atau berusaha dan bekerja di sektor lainnya. Sebagian mereka yang sukses di sektor pertanian mempunyai lahan pertanian yang relatif luas dibanding petani pada umumnya. Anggapan dan realita tersebut yang menyebabkan munculnya keengganan penduduk muda sekarang ini untuk terjun berusaha di sektor pertanian, meskipun rumah tangganya mempunyai lahan pertanian.

No	Karakteristik	Satuan	2013
1	Jumlah Petani		
	Laki-Laki	Orang	70 777
	Perempuan	Orang	25 315
2	Rata-rata petani per RT	Orang/RT	1,34
3	Rata-rata umur petani		
	Laki-Laki	Tahun	42,05
	Perempuan	Tahun	39,12
4	Sex Ratio	-	279

Tabel 2.3

Karakteristik Petani di Papua Barat, 2013

Sumber : Hasil Olah ST dan SPP 2013

Dari sisi pendidikan, sekitar 62,38 petani di Papua Barat belum pernah sekolah atau tamatan SD. Sudah barang tentu dengan pendidikan yang rendah, sumber daya manusia (SDM) petaninya juga rendah dan sulit bersaing dengan petani wilayah (negara) lain. Padahal untuk mendapatkan hasil produktivitas pertanian yang tinggi dengan kualitas produk pertanian yang berdaya saing sangat membutuhkan petani dengan pendidikan yang tinggi. Lagi-lagi faktor kemiskinan yang diduga sebagai penyebab rendahnya pendidikan di level petani. Ketidakmampuan untuk bersekolah menyebabkan banyak yang memilih untuk tidak meneruskan pendidikan jenjang yang tinggi.



Gambar 2.3

Presentase Petani Berdasarkan Tingkat Pendidikan, 2013

Sumber : Hasil Olah ST dan SPP 2013

3

LAHAN PERTANIAN, ISU HANGAT YANG DIANGGAP DINGIN



BAB 3

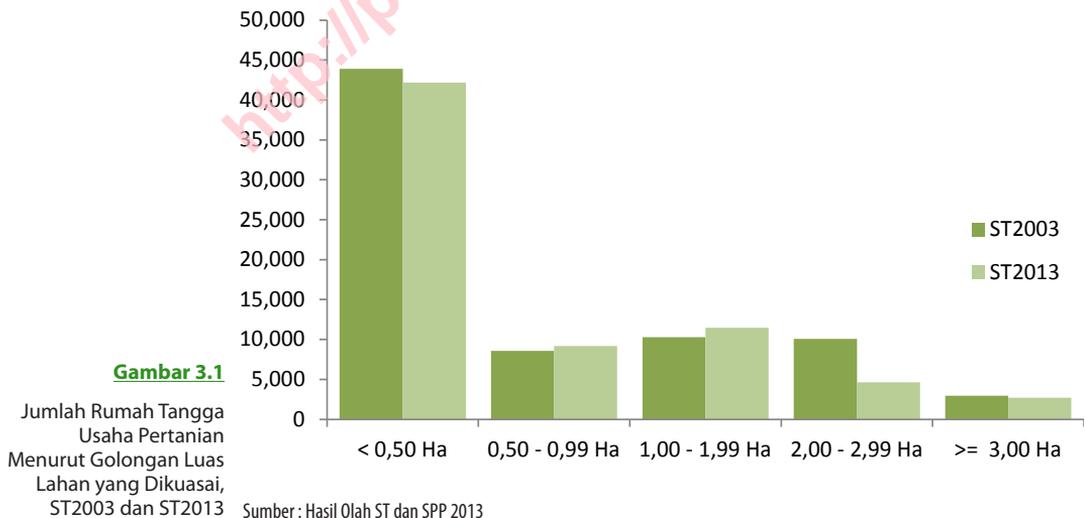
Lahan Pertanian, Isu Hangat Yang Dianggap Dingin

"Hasil ST2013 menunjukkan bahwa rumah tangga petani gurem lebih banyak dari rumah tangga bukan petani gurem."



A. Petani Papua Barat, Tuan Tanah atau Gurem?

Lahan merupakan salah satu faktor yang menentukan besar kecilnya pendapatan petani. Oleh karena itu sangat menarik jika melihat keterkaitan antara lahan pertanian yang dikuasai dengan besarnya pendapatan rumah tangga usaha pertanian.



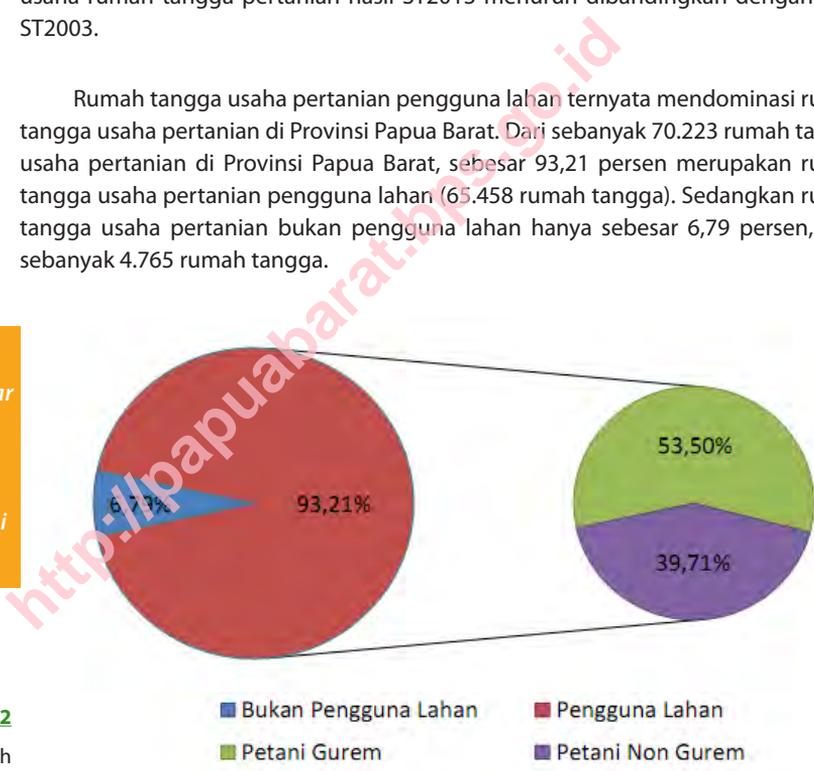
Apabila diklasifikasikan menurut golongan luas lahan, hasil ST2003 menunjukkan jumlah rumah tangga usaha pertanian yang menguasai lahan kurang dari 0,50 hektar (5.000 m²) mendominasi jumlah rumah tangga usaha pertanian di Provinsi Papua Barat. Kondisi yang hampir serupa terjadi pada hasil ST2013, dimana jumlah rumah tangga usaha pertanian dengan luas lahan yang dikuasai kurang dari 0,50 hektar (5.000 m²) sebanyak 42.196 rumah tangga, mengalami penurunan

sebesar 3,85 persen dibandingkan hasil ST2003, yang tercatat sebanyak 43.885 rumah tangga. Rumah tangga usaha pertanian dengan luas lahan yang dikuasai antara 0,50–0,99 hektar (5.000–9.999 m²) pada ST2013 adalah sebanyak 9.173 rumah tangga, meningkat sebesar 6,89 persen bila dibandingkan dengan ST2003 yang tercatat sebanyak 8.582 rumah tangga.

Golongan luas lahan 1,00–1,99 hektar (10.000–19.999 m²) tercatat mempunyai jumlah rumah tangga usaha pertanian sebanyak 11.486 rumah tangga pada ST2013, meningkat sebanyak 1.179 rumah tangga jika dibandingkan ST2003. Sedangkan untuk golongan luas lahan yang dikuasai lebih dari 2,00 hektar (20.000 m²), jumlah usaha rumah tangga pertanian hasil ST2013 menurun dibandingkan dengan hasil ST2003.

Rumah tangga usaha pertanian pengguna lahan ternyata mendominasi rumah tangga usaha pertanian di Provinsi Papua Barat. Dari sebanyak 70.223 rumah tangga usaha pertanian di Provinsi Papua Barat, sebesar 93,21 persen merupakan rumah tangga usaha pertanian pengguna lahan (65.458 rumah tangga). Sedangkan rumah tangga usaha pertanian bukan pengguna lahan hanya sebesar 6,79 persen, atau sebanyak 4.765 rumah tangga.

“Hasil ST2013 menunjukkan sebesar 53,50 persennya (37.570 rumah tangga) merupakan rumah tangga petani gurem.”



Gambar 3.2

Perbandingan Rumah Tangga Pertanian Pengguna Lahan dan Petani Gurem, ST2013

Sumber : Hasil Olah ST dan SPP 2013

Rumah tangga pertanian pengguna lahan dapat digolongkan ke dalam dua kelompok besar, yaitu rumah tangga petani gurem (rumah tangga usaha pertanian pengguna lahan yang menguasai lahan kurang dari 0,50 hektar) dan rumah tangga bukan petani gurem (rumah tangga usaha pertanian pengguna lahan yang menguasai lahan 0,50 hektar atau lebih). Hasil ST2013 menunjukkan bahwa dari sebesar 93,21 persen rumah tangga usaha pertanian pengguna lahan, sebesar 53,50 persennya (37.570 rumah tangga) merupakan rumah tangga petani gurem, sedangkan rumah tangga bukan petani gurem sebesar 39,71 persen (27.888 rumah tangga).

Penguasaan Lahan Pertanian	Perkotaan		Perdesaan	
	Bersertifikat		Bersertifikat	
	Sertifikat SHM, SGHB, SHP, SSRS	Girik, akta jual beli notaris/PPAT	Sertifikat SHM, SGHB, SHP, SSRS	Girik, akta jual beli notaris/PPAT
< 0,25 Ha	20,38	23,00	14,23	3,60
0,25 - 0,50 Ha	56,38	28,81	27,68	13,37
0,50 - 0,99 Ha	52,00	72,80	41,79	11,99
1,00 - 2,49 Ha	60,27	33,73	55,95	8,21
≥ 2,49 Ha	50,00	21,79	52,28	14,10
Menguasai lahan	34,27	29,05	35,09	8,23

Tabel 3.2

Persentase Lahan Pertanian Menurut Status Kepemilikan, Daerah dan Luas Lahan yang Dimiliki, 2013

Sumber : Hasil Olah ST dan SPP 2013

Bagi masyarakat perdesaan, surat kepemilikan tanah dalam bentuk girik dan akta jual beli adalah cukup sebagai surat sah tanda kepemilikan lahan. Dibanding dengan surat kepemilikan lainnya, bentuk girik cukup sederhana, berisi nama pemilik lahan beserta luasnya. Dalam pengurusan/pembuatan/mutasi girik dan akta jual beli lahan tidak serumit surat kepemilikan dalam bentuk SHM atau lainnya, cukup diketahui kepala desa/lurah dan camat setempat. Di banyak daerah, cukup dengan membawa surat girik atau akta jual beli tanah sudah bisa digunakan sebagai agunan untuk pengajuan kredit modal usaha di koperasi atau lembaga keuangan lainnya.

Namun lahan pertanian yang dimiliki rumah tangga usaha pertanian di Papua Barat banyak yang belum memiliki sertifikat baik sertifikat SHM, SHGB, SHP, SSRS maupun girik, akta jual beli notaris/PPAT, di daerah perkotaan maupun perdesaan lebih dari 60-70 persen rumah tangga usaha pertanian tidak memiliki sertifikat. Hal ini juga bisa disebabkan oleh budaya masyarakat Papua Barat yang lebih mengutamakan aturan adat yaitu Hak Ulayat.

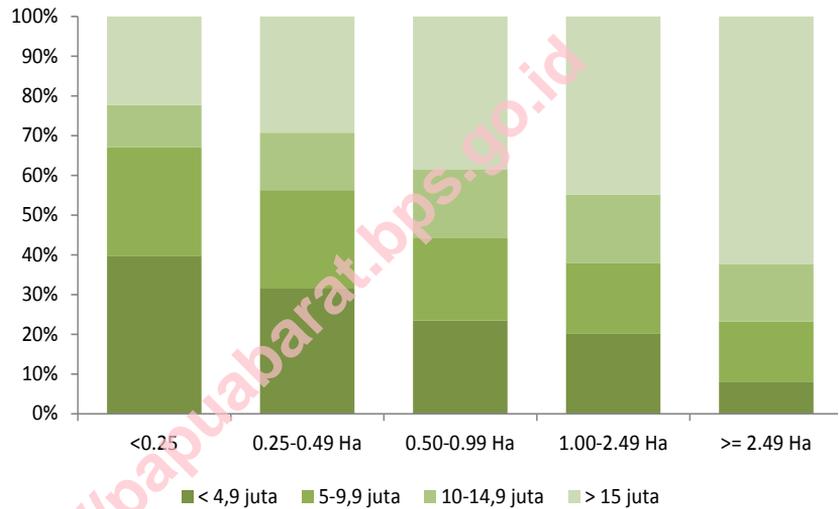
Hak Ulayat adalah kewenangan, yang menurut hukum adat, dimiliki oleh masyarakat hukum adat atas wilayah tertentu yang merupakan lingkungan warganya, dimana kewenangan ini memperbolehkan masyarakat untuk mengambil manfaat dari sumber daya alam, termasuk tanah, dalam wilayah tersebut bagi kelangsungan hidupnya. Masyarakat dan sumber daya yang dimaksud memiliki hubungan secara lahiriah dan batiniah turun temurun dan tidak terputus antara masyarakat hukum adat tersebut dengan wilayah yang bersangkutan. Dengan memegang teguh aturan tersebut bisa mengakibatkan kurangnya kesadaran masyarakat untuk mengurus sertifikat kepemilikan tanah.

Lahan yang mempunyai surat kepemilikan dalam bentuk sertifikat mempunyai nilai jual yang tinggi. Meskipun cara perolehannya cukup memakan waktu dan agak rumit, tetapi legalitas kepemilikannya lebih valid dibanding girik dan akta jual beli. Pemerintah Daerah Papua Barat perlu turun tangan dalam membantu petani



dalam memiliki sertifikat tanah atas lahan pertanian yang dikuasai. Dengan memiliki sertifikat atas lahan pertanian yang dikuasai akan menghasilkan nilai tanah yang tinggi dan mengurangi resiko petani untuk kehilangan lahan pertanian di masa mendatang.

Dilihat dari sebaran luas lahan dan pendapatan dari sektor pertanian, baik perkotaan maupun perdesaan diperoleh kesimpulan bahwa semakin luas lahan pertanian yang dikuasai semakin besar pendapatan yang diperoleh dari usaha pertanian.



Gambar 3.3
Presentase Rumah Tangga Pertanian Menurut Lahan yang Dikuasai dan Kelompok Pendapatan dari Sektor Pertanian, ST2013

Sumber : Hasil Olah ST dan SPP 2013

Rumah tangga usaha pertanian yang mempunyai lahan kurang dari 0,25 Ha dan mempunyai pendapatan di bawah 5 juta rupiah per tahun (perkotaan+perdesaan) adalah sebanyak 39,60 persen, sedangkan yang mempunyai pendapatan lebih dari 15 juta rupiah hanya sebesar 22,31 persen. Selanjutnya bergerak alami, semakin luas lahan yang dikuasai, semakin dominan jumlah rumah tangga yang memiliki pendapatan lebih besar, hingga tercatat pada penguasaan lahan di atas 2,5 Ha tercatat 62,42 persen yang memiliki pendapatan di atas 15 juta rupiah. Pola ini juga terjadi pada rumah tangga di perkotaan dan perdesaan secara spasial.

4

SUMBER DAYA PRODUKTIF BUKAN TAK TERJANGKAU



BAB 4

Sumber Daya Produktif Bukan Tak Terjangkau

“Optimalisasi usaha yang masih terhambat merupakan tantangan terbesar bagi sektor pertanian untuk terus bertahan.”



A. Akses Terhadap Permodalan

Permodalan merupakan unsur yang sangat esensial dalam mendukung peningkatan produksi dan peningkatan kesejahteraan petani. Fungsi modal dalam tataran mikro (usaha tani) tidak hanya sebagai salah satu faktor produksi, tetapi juga berperan dalam peningkatan kapasitas petani dalam mengadopsi teknologi seperti benih bermutu, pupuk berimbang, ataupun teknologi pasca panen (Ashari, 2009). Untuk itu, pemerintah dalam UU No. 19 tahun 2013 telah mencetuskan kebijakan penyediaan fasilitas pembiayaan dan permodalan sebagai salah satu strategi pemberdayaan petani.

Di samping distribusi penguasaan lahan, aspek permodalan bagi petani hingga saat ini masih menjadi masalah klasik yang sepertinya tidak kunjung selesai. Permasalahan ini menjadi lebih rumit ketika dihadapkan dengan persoalan petani gurem dan penggarap. Data SPP 2013 memberikan fakta yang cukup mencengangkan, tercatat lebih dari 80% petani Papua Barat masih mengandalkan modal sendiri sebagai sumber pembiayaan usahanya. Padahal, kebanyakan dari mereka masih harus menyisihkan sebagian atau bahkan seluruh pendapatannya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Pemerintah tentu saja tidak tinggal diam dengan situasi seperti ini. Selama lebih dari empat dekade, pemerintah telah meluncurkan beberapa kredit program/ bantuan modal bagi petani dan pelaku usaha pertanian. Bantuan modal ini diwujudkan dalam beberapa bentuk seperti dana bergulir, penguatan modal, subsidi bunga maupun yang mengarah komersial (Ashari, 2009). Namun demikian, hingga saat ini belum semua petani bisa merasakan manfaatnya. Tabel 4.1 memperlihatkan bahwa fasilitas kredit tidak dapat dirasakan di semua subsektor pertanian khususnya dikelompok rumah tangga usaha pertanian yang memiliki rata-rata pendapatan kurang dari 1 juta per bulan.

Disadari bahwa memang tidak semua subsektor di pertanian selalu membutuhkan modal yang besar sebagai faktor pelancarnya. Jika ditelaah menurut sumber pendapatan utama rumah tangganya; tanaman pangan, hortikultura juga perikanan boleh dibilang sebagai subsektor papan atas yang berhasil menarik perhatian beberapa bank untuk mengucurkan kreditnya. Rumah tangga yang berusaha di subsektor ini relatif lebih mudah mendapatkan bantuan kredit dibanding yang lain. Hal ini wajar mengingat kebutuhan modal serta omset yang dihasilkan oleh subsektor ini relatif lebih besar dibandingkan subsektor lain, misalnya peternakan.

Sumber Pendapatan Utama	Kelompok Pendapatan			
	< 1 Juta	1-2 Juta	2-3 Juta	> 3 Juta
Sektor Pertanian	8,70	36,73	21,44	33,13
Tanaman Pangan	32,89	15,79	0,00	51,32
Hortikultura	14,73	56,25	17,41	11,61
Perkebunan	0,00	39,00	39,00	22,00
Peternakan	0,00	66,10	33,90	0,00
Perikanan	0,00	17,79	0,00	82,21
Kehutanan	0,00	0,00	100,00	0,00
Jasa Pertanian	0,00	0,00	100,00	0,00
Sektor Non Pertanian	0,00	19,17	0,00	80,83
Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabel 4.1
Presentase RTUP Menerima Bantuan Kredit Bank Berdasarkan Sumber Pendapatan Utama dan Kelompok Rata-rata Pendapatan per Bulan, 2013 (%)

Sumber : Hasil Olah ST dan SPP 2013

Lebih jauh ditinjau menurut kelompok pendapatan, karakteristik RTUP yang memperoleh bantuan kredit ini bagaikan dua sisi mata uang. Di satu sisi adalah mereka yang baru saja memulai usahanya sehingga pendapatannya masih sangat minim (kurang dari 1 juta per bulan). Rumah tangga kategori ini memanfaatkan bantuan kredit selain untuk menjalankan usahanya juga untuk menjaga kualitas kehidupannya terutama yang terkait daya beli. Di sisi lain yaitu rumah tangga yang usahanya sudah terbilang maju dengan pendapatan yang tinggi (di atas 3 juta per bulan). Rumah tangga kategori ini membutuhkan bantuan kredit dengan orientasi lebih kepada peningkatan keuntungan dibanding sekedar untuk memenuhi kebutuhan hidup. Meskipun persentase kedua kelompok ini terpaut cukup jauh, setidaknya hal ini dapat menjadi masukan untuk para pembuat kebijakan agar juga memperhatikan nasib para petani pemula dan berpendapatan rendah, sehingga mereka tidak terlalu lama terjerumus dalam cengkeraman para tengkulak/rentenir.

Mengingat kredit telah menjadi bagian dari usaha tani, ketersediaan sumber pembiayaan yang murah dan mudah diakses petani dengan tepat waktu masih terus menjadi sasaran pembangunan pertanian. Melalui kebijakan pemerintah, berbagai lembaga permodalan berbunga rendah telah berkembang di tingkat petani, seperti BRI Unit Desa, BPR, pegadaian, dan koperasi (Supriatna, 2009). Namun kenyataannya jauh panggang dari api. Hasil penelitian Nurmanaf (2007) membuktikan bahwa pembiayaan informal lah yang justru lebih diminati oleh petani. Para petani di tingkat

pedesaan lebih cenderung memanfaatkan pinjaman dari para tengkulak, pelepas uang (money lender) ataupun pedagang sarana produksi meski suku bunga yang ditetapkan cenderung lebih tinggi dibanding lembaga komersial.

Tabel 4.2 menggambarkan bahwa rumitnya proses administrasi kredit menjadi alasan terbesar mengapa penyaluran kredit melalui lembaga komersial menjadi kurang menarik bagi petani meski suku bunganya relatif rendah. Secara rata-rata, lebih dari 50% RTUP yang pernah mengajukan kredit mengaku kesulitan karena prosesnya yang terlalu formal, rumit dan membutuhkan waktu yang lama. Kesulitan ini terutama dirasakan oleh RTUP yang berada di wilayah yang sulit seperti Papua Barat.



Sumber Pendapatan Utama	Kesulitan Pengajuan Kredit		
	Lokasi Terpencil	Tidak Memiliki Agunan	Proses Administrasi Kredit Rumit dan lainnya
Sektor Pertanian	6,11	24,15	69,74
Tanaman Pangan	0,00	17,02	82,98
Hortikultura	0,00	13,64	86,36
Perkebunan	22,63	25,26	52,11
Peternakan	0,00	0,00	100,00
Perikanan	0,00	43,56	56,44
Kehutanan	0,00	0,00	100,00
Jasa Pertanian	0,00	0,00	0,00
Sektor Non Pertanian	0,00	22,56	77,44
Lainnya	0,00	0,00	100,00

Tabel 4.2
 Persentase Rumah Tangga Usaha Pertanian yang Mengalami Kesulitan Mengajukan Kredit Menurut Sumber Pendapatan Utama, 2013 (%)

Sumber : Hasil Olah ST dan SPP 2013

Alasan berikutnya yang mempersulit akses petani terhadap kredit permodalan adalah ketiadaan agunan. Umumnya, lembaga pembiayaan komersial mensyaratkan kepemilikan agunan yang berupa sertifikat tanah dan bangunan untuk bisa memperoleh kredit. Persyaratan ini tentu sulit dipenuhi petani, terutama petani gurem dan petani penggarap karena mereka biasanya tidak memiliki sertifikat tanah dan bangunan. Tabel 4.2 memperlihatkan secara rata-rata persentase RTUP yang kesulitan akses kredit akibat ketiadaan agunan mencapai 24,15%.

Berbagai temuan di atas mengindikasikan bahwa peran lembaga pembiayaan komersial dalam melayani permodalan petani kecil belum optimal. Supriatna (2009) dalam penelitiannya mengemukakan bahwa masih ada jurang pemisah (gap) antara pola pelayanan yang ditawarkan oleh lembaga pembiayaan dengan karakteristik petani sebagai pengguna. Pada setiap lembaga pembiayaan, beberapa komponen pola pelayanan telah sesuai dengan karakteristik petani, tetapi komponen lainnya belum sesuai sehingga menjadi kendala bagi petani dalam mengakses lembaga tersebut.

Selain kredit, persentase rumah tangga usaha pertanian yang memperoleh bantuan, hibah dan subsidi relatif masih rendah. Kecuali rumah tangga dengan pendapatan utama jasa pertanian, rumah tangga yang memperoleh bantuan/hibah/subsidi untuk semua sektor usaha pertanian di bawah 30 persen. Agaknya bantuan, hibah dan subsidi masih belum dirasakan petani secara luas dan merata, khususnya petani-petani di daerah sulit dan terpelosok yang jauh dari sarana dan prasarana produksi pertanian. Bantuan/hibah/subsidi yang dimaksud meliputi pembiayaan, bibit/benih, pupuk, pestisida, alat-alat pertanian, kapal/perahu dan bantuan lainnya.



Sumber Pendapatan Utama	Mendapatkan Bantuan Hibah	
	Pernah	Tidak Pernah
Sektor Pertanian	21,85	78,15
Tanaman Pangan	28,96	71,04
Hortikultura	21,38	78,62
Perkebunan	24,74	75,26
Peternakan	16,78	83,22
Perikanan	13,26	86,74
Kehutanan	14,22	85,78
Jasa Pertanian	38,30	61,70
Sektor Non Pertanian	17,21	82,79
Lainnya	12,59	87,41

Tabel 4.3

Persentase Rumah Tangga Usaha Pertanian yang Memperoleh Bantuan/Hibah/Subsidi Menurut Sumber Pendapatan Utama, 2013 (%)

Sumber: Hasil Olah ST dan SPP 2013

5. Akses Terhadap Kelembagaan

Dalam meningkatkan usaha pertanian, akses terhadap kelembagaan juga sangat diperlukan. Petani yang biasanya mengikuti penyuluhan, ikut sebagai kelompok tani dan memanfaatkan koperasi biasanya menjadi petani yang mandiri, produktif, bersaing dan berpendapatan relatif tinggi. Dengan mengikuti penyuluhan, petani akan mempunyai ilmu pengetahuan yang cukup untuk meningkatkan hasil usaha pertaniannya dari mulai memilih bibit, mengolah lahan, menanam, memupuk, memelihara, pengepakan, pemasaran hingga pengolahan hasil produksi.

Berbagai permasalahan yang dihadapi petani, sedikit banyak akan tersolusikan jika ikut sebagai anggota kelompok tani. Melalui keanggotaan sebagai kelompok tani, antara petani akan terjadi saling sharing pengetahuan yang sangat menguntungkan bagi petani sendiri. Petani akan memperoleh informasi dan isu terkini tentang pertanian yang menjadi bahasan utama dalam pertemuan-pertemuan kelompok tani. Tidak kalah pentingnya keberadaan koperasi di tengah-tengah masyarakat pertanian. Selain kredit dan permodalan, petani juga terbantu dalam hal memasarkan hasil produksinya melalui koperasi.

Sumber Pendapatan Utama	Mengikuti Penyuluhan	Anggota Kelompok Tani	Memanfaatkan Koperasi
Sektor Pertanian	15,95	26,19	0,90
Tanaman Pangan	14,54	29,52	0,44
Hortikultura	15,95	30,38	2,30
Perkebunan	24,55	25,83	0,57
Peternakan	8,94	42,61	0,00
Perikanan	13,23	14,80	0,20
Kehutanan	5,09	11,80	0,64
Jasa Pertanian	16,31	40,43	0,00
Sektor Non Pertanian	13,04	21,67	1,74
Lainnya	20,68	14,21	5,22

Tabel 4.4

Persentase Rumah Tangga Usaha Pertanian Menurut Akses Kelembagaan dan Sumber Pendapatan Utama, 2013 (%)

Sumber : Hasil Olah ST dan SPP 2013

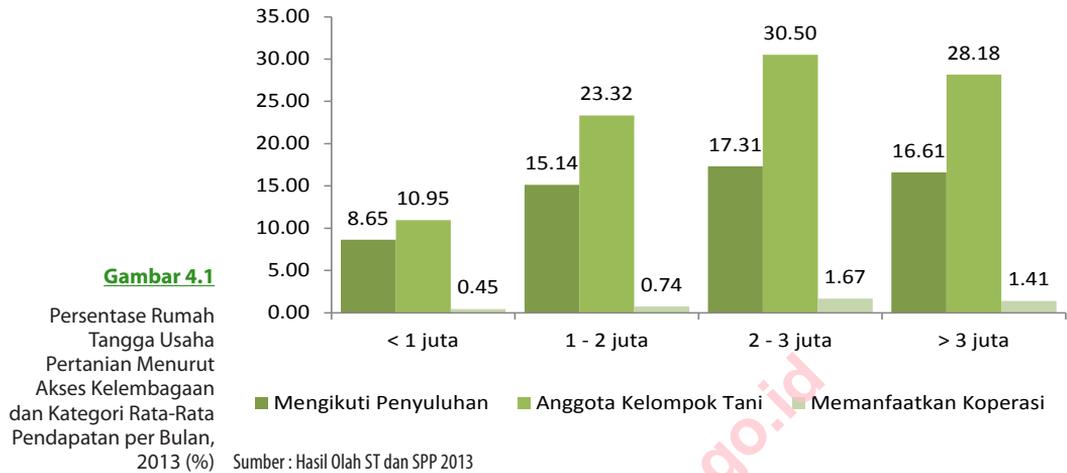


Dari seluruh rumah tangga usaha pertanian, yang pernah mengikuti penyuluhan pertanian kurang dari 25 persen untuk seluruh kategori sumber pendapatan utama. Ini menunjukkan bahwa kebanyakan petani yang memperoleh pengetahuan bertani baru sebatas ilmu yang didapat dari keluarga secara turun temurun (ilmu warisan).

Persentase rumah tangga yang menjadi anggota kelompok tani pada setiap kategori juga tidak lebih dari 45 persen. Di beberapa rumah tangga usaha pertanian, tidak sedikit yang dijumpai mengaku bahwa sebenarnya dalam kelompok taninya tidak ada kegiatan yang berarti (tidak aktif). Nama kelompok taninya dibentuk dengan maksud hanya memenuhi syarat untuk mendapatkan bantuan/hibah/subsidi terutama benih dan pupuk khususnya dari program pemerintah. Masih belum dimengerti dengan baik, manfaat mengikuti kelompok tani yang sesungguhnya.

Sebagaimana keikutsertaan dalam penyuluhan dan kelompok tani, persentase rumah tangga usaha pertanian yang memanfaatkan koperasi sangat sedikit atau kurang dari 10 persen. Dalam kaitan kredit, petani lebih memilih meminjam secara perseorangan kepada orang lain, sedangkan dalam kaitan pemasaran, mereka lebih memilih untuk menjual ke pasar tradisional dan tengkulak daripada melalui koperasi. Lagi-lagi kekhawatiran mengalami kesulitan administrasi sebagai alasan keengganan petani untuk memakai jasa koperasi.

Dilihat dari kategori pendapatan, tampak bahwa ada kecenderungan semakin tinggi pendapatan rumah tangga usaha pertanian, semakin banyak rumah tangga yang anggota rumah tangga dengan usaha pertanian yang mengikuti penyuluhan, menjadi anggota kelompok tani dan memanfaatkan koperasi. Rumah tangga dengan penghasilan di bawah 1 juta rupiah yang anggota rumah tangga berprofesi sebagai petani dengan mengikuti penyuluhan (8,65 persen), menjadi anggota kelompok tani (10,95 persen) dan memanfaatkan koperasi (0,45 persen). Sementara, yang berpenghasilan di atas 3 juta rupiah ke atas dengan anggota rumah tangga dengan profesi petani yang mengikuti penyuluhan (16,61 persen), menjadi anggota kelompok tani (28,18 persen) dan memanfaatkan koperasi (1,41 persen).



C. Akses Terhadap Sarana Produksi

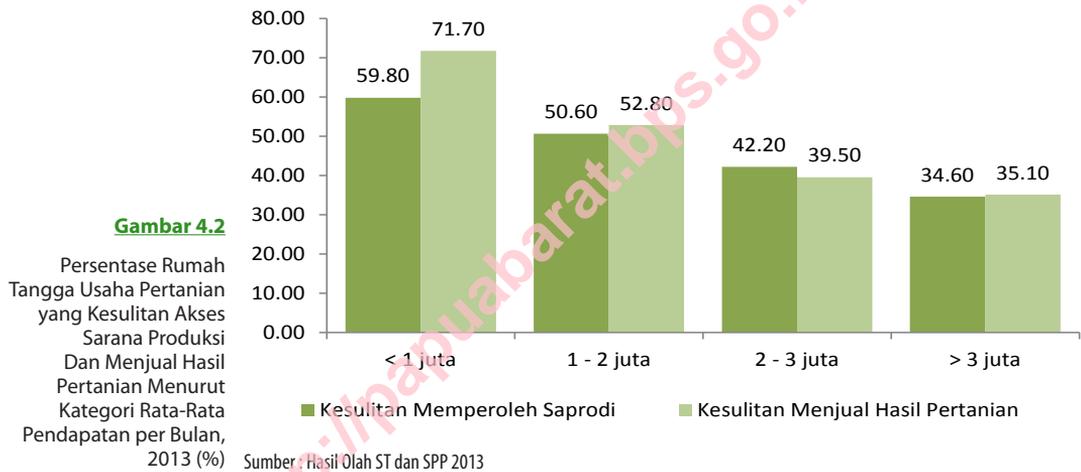
Lebih dari 45 persen rumah tangga usaha pertanian dengan sumber pendapatan utama sektor pertanian yang mengalami kesulitan memperoleh saprodi (sarana produksi pertanian) di Papua Barat. Keseriusan Pemerintah Provinsi Papua Barat untuk memacu pertanian di Papua Barat harus semakin fokus agar petani semakin mudah dalam akses sarana produksi. Sarana-sarana produksi pertanian harus diupayakan dapat terjangkau oleh seluruh rumah tangga pertanian sampai pelosok.

Sumber Pendapatan Utama	Akses Saprodi	
	Kesulitan Memperoleh Saprodi	Kesulitan Menjual Hasil Pertanian
Sektor Pertanian	47,49	51,65
Tanaman Pangan	50,64	66,39
Hortikultura	50,88	55,54
Perkebunan	36,88	37,58
Peternakan	29,73	27,63
Perikanan	51,94	47,47
Kehutanan	62,69	63,99
Jasa Pertanian	41,84	33,69
Sektor Non Pertanian	34,67	30,07
Lainnya	28,24	9,53

Tabel 4.5
Persentase Rumah Tangga Usaha Pertanian yang Kesulitan Akses Sarana Produksi Dan Menjual Hasil Pertanian, 2013 (%)

Sumber: Hasil Olah ST dan SPP 2013

Rumah tangga usaha pertanian dengan pendapatan utama sektor pertanian yang mengalami kesulitan menjual hasil pertanian lebih dari 50 persen. Ini juga menunjukkan akses pasar bagi petani semakin susah. Dari sisi kategori pendapatan, rumah tangga usaha pertanian dengan pendapatan di bawah 1 juta mengalami kesulitan memperoleh saprodi (59,80 persen). Hal yang sama juga terjadi pada variabel kesulitan menjual hasil pertanian atau kesulitan pemasaran, rumah tangga dengan pendapatan di bawah 1 juta yang paling banyak mengalami kesulitan pemasaran (71,70 persen). Sedangkan rumah tangga dengan pendapatan di atas 3 juta rupiah tercatat paling sedikit yang mengalami kesulitan akses saprodi (34,60 persen) dan kesulitan pemasaran (35,10 persen). Hal ini kembali menunjukkan bahwa umumnya rumah tangga usaha pertanian dengan pendapatan di bawah 1 juta banyak memiliki kendala dalam mengembangkan usaha pertaniannya.



Tabel 4.6 menunjukkan dari seluruh rumah tangga yang mengaku mengalami kesulitan akses saprodi, lebih dari 30 persen disebabkan karena lokasi terpencil dan mahal nya saprodi. Beberapa daerah terpencil merasakan sekali kesulitan akses saprodi terutama daerah pegunungan dan kepulauan. Umumnya mereka berusaha untuk mencari pengganti bahan-bahan pendukung produksi pertanian jika akses transportasi sulit diperoleh. Di Papua Barat memang masih cukup banyak petani yang tinggal di kepulauan atau dalam hutan yang jauh dari akses saprodi.

Rumah tangga yang mengalami kesulitan saprodi karena tidak tersedianya akses saprodi lebih dari 25 persen. Sebagian rumah tangga mengakui bahwa distribusi saprodi di daerahnya tidak tersedia dengan baik. Penimbunan pupuk sering terjadi, sehingga sering terjadi kelangkaan pupuk yang mengakibatkan harga pupuk mahal. Ketersediaan bibit unggul juga terbatas, karena sebagian besar bibit unggul berasal dari impor.

Rumah tangga yang mengalami kesulitan saprodi karena mahal nya saprodi juga lebih dari 25 persen. Sudah barang tentu menjaga inflasi pedesaan adalah penting. Sarana produksi pertanian yang mahal, tidak bisa terjangkau oleh petani terutama yang berpendapatan yang rendah dan tentunya akan menjadi penghambat produktivitas petani.

Sumber Pendapatan Utama	Alasan Utama Kesulitan Akses Sapropdi			
	Lokasi Terpencil	Tidak Tersedia	Mahal	Lainnya
Sektor Pertanian	36,02	29,52	29,59	4,87
Tanaman Pangan	26,12	34,84	33,56	5,47
Hortikultura	14,65	41,40	43,95	0,00
Perkebunan	31,85	35,59	28,49	4,07
Peternakan	21,55	37,15	29,18	12,12
Perikanan	25,20	32,27	39,57	2,97
Kehutanan	35,16	34,80	26,13	3,91
Jasa Pertanian	0,00	100,00	0,00	0,00
Sektor Non Pertanian	26,12	34,84	33,56	5,47
Lainnya	14,65	41,40	43,95	0,00

Tabel 4.6

Persentase Rumah Tangga Usaha Pertanian Menurut Alasan Utama Kesulitan Akses Sarana Produksi Dan Sumber Pendapatan Utama, 2013 (%)

Sumber : Hasil Olah ST dan SPP 2013

Sumber Pendapatan Utama	Alasan Utama Kesulitan Menjual Hasil Pertanian				
	Akses Pasar Sulit	Biaya Transportasi Mahal	Pasar Tidak Tersedia	Harga Rendah	Lainnya
Sektor Pertanian	32,99	32,23	17,46	14,69	2,63
Tanaman Pangan	47,01	28,00	9,14	13,68	2,16
Hortikultura	22,14	40,94	19,33	15,24	2,36
Perkebunan	36,81	29,30	17,00	13,03	3,86
Peternakan	42,15	18,00	5,31	26,33	8,21
Perikanan	17,58	30,59	29,14	19,65	3,04
Kehutanan	40,85	31,71	22,07	5,37	0,00
Jasa Pertanian	15,79	14,74	69,47	0,00	0,00
Sektor Non Pertanian	34,01	18,85	21,06	20,34	5,75
Lainnya	15,09	30,19	0,00	16,98	37,74

Tabel 4.7

Persentase Rumah Tangga Usaha Pertanian Menurut Alasan Utama Kesulitan Menjual Hasil Pertanian Dan Sumber Pendapatan Utama, 2013 (%)

Sumber : Hasil Olah ST dan SPP 2013





Akses ke pasar yang sulit juga merupakan kendala bagi petani. Sering dijumpai pula rumah tangga usaha pertanian yang tidak tahu harus kemana menjual hasil produksinya karena sulitnya akses ke pasar, apakah karena jauhnya tempat pemasaran atau sarana transportasi yang tidak mendukung. Rumah tangga usaha pertanian dengan sumber pendapatan utama sektor pertanian yang mengalami kesulitan pemasaran akibat akses pasar yang sulit sebesar 32,99 persen. Sulitnya petani lokal memasarkan hasilnya dibandingkan produk impor yang selalu membanjiri pasar mengakibatkan petani lokal kalah bersaing. Bagi petani khususnya yang megusahakan tanaman padi, serangan impor beras dari negara lain mematikan akses pemasaran mereka.

Rumah tangga usaha pertanian dengan sumber pendapatan utama sektor pertanian yang mengalami kesulitan akses pemasaran kebanyakan dikarenakan biaya transportasi mahal atau 32,23 persen. Banyak petani di Papua Barat yang masih memiliki tempat tinggal jauh dari jangkauan sarana transportasi, dan umumnya transportasi yang menjangkau wilayah pelosok tidak memiliki jadwal tetap dan mahal. Jadwal tidak tetap dan minimnya sarana transportasi tersebut tentunya menjadi kendala bagi petani untuk memasarkan hasil pertaniannya, dimana umumnya hasil pertanian tersebut juga tidak tahan lama atau cepat membusuk.

Harga rendah menjadi kendala bagi rumah tangga usaha pertanian dengan sumber pendapatan utama sektor pertanian sebesar 14,69 persen. Harga yang rendah ini menyebabkan kerugian petani, akibatnya NTP yang nilainya di atas 100 semakin tidak bermakna. Rendahnya harga produksi pertanian tidak diikuti rendahnya harga produk non pertanian. Meskipun harga yang diterima petani lebih tinggi dibanding harga yang dibayar petani (dalam NTP), tetap saja petani mengalami kerugian.

5

RUMAH TANGGA PERTANIAN DAN ANCAMAN KEMISKINAN



BAB 5

Rumah Tangga Pertanian dan Ancaman Kemiskinan

“Tanaman Bahan Makanan merupakan usaha yang paling banyak diusahakan di kabupaten/kota di Papua Barat.”



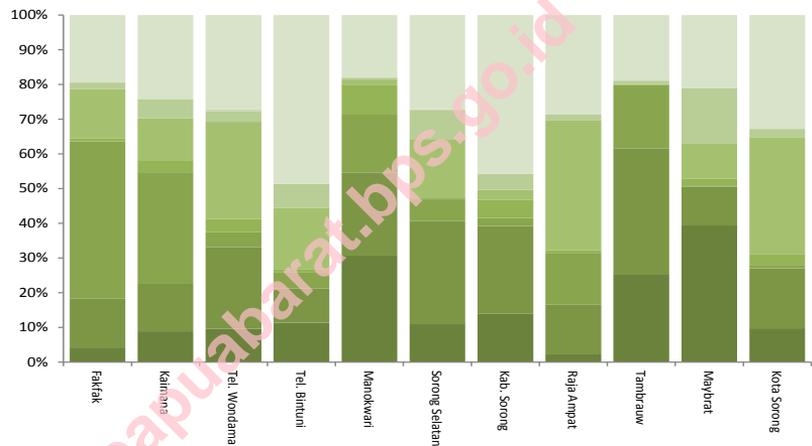
A. Tanaman Bahan Makanan Sang Primadona

Presentase rumah tangga usaha pertanian dengan sumber pendapatan utama dari sektor pertanian sebesar 72,18 persen di Papua Barat. Kabupaten Manokwari memiliki presentase tertinggi untuk rumah tangga usaha pertanian dengan sumber pendapatan utama dari sektor pertanian yaitu sebesar 82,15 persen, sedangkan Kabupaten Bintuni memiliki presentase terendah (51,39 persen). Presentase rumah tangga usaha pertanian di Papua Barat dengan sumber pendapatan utama di luar pertanian sebesar 27,82 persen. Sumber pendapatan utama di luar pertanian tersebut misalkan berasal dari gaji sebagai buruh pertanian maupun non pertanian, pegawai negeri atau swasta, dan penerima dana transfer.

Tanaman bahan makanan (tanaman pangan dan hortikultura) merupakan sumber pendapatan utama tertinggi pada sektor pertanian di Papua Barat yaitu sebesar 37,53 persen. Rumah tangga usaha pertanian di Papua Barat yang memiliki sumber pendapatan utama dari hortikultura sebesar 20,12 persen dan tidak berbeda jauh dengan rumah tangga usaha pertanian dengan sumber pendapatan utama tanaman pangan yaitu sebesar 17,41 persen. Lahan luas serta subur dan cuaca yang relatif stabil menjadikan dua subsektor tersebut dapat berkembang dengan baik dan menjadi primadona oleh banyak petani. Komoditi yang paling banyak diusahakan rumah tangga usaha pertanian pada subsektor tersebut yaitu padi, palawija, buah-buahan, dan sayuran.

Presentase tertinggi rumah tangga usaha pertanian yang sumber pendapatan utamanya tanaman bahan makanan ada pada Kabupaten Tambrauw sebesar 61,62 persen. Jika dirinci sumber pendapatan utama per subsektornya, rumah tangga usaha pertanian dengan sumber pendapatan utama tanaman pangan sebesar 25,19 persen dan hortikultura sebesar 36,43 persen (merupakan presentase tertinggi di Papua Barat). Sedangkan jika dilihat rumah tangga usaha pertanian yang paling banyak memiliki sumber pendapatan utama dari tanaman pangan maka Kabupaten Maybrat berada di peringkat pertama yaitu 39,40 persen.

Berbeda dengan Kabupaten Tambrauw dan Maybrat yang relatif bergantung pada usaha tanaman bahan makanan, Kabupaten Manokwari walaupun memiliki presentase tertinggi untuk rumah tangga usaha pertanian dengan sumber utama pendapatan sektor pertanian tetapi memiliki komposisi sumber pendapatan utama dari subsektor yang lebih beragam. Rumah tangga usaha pertanian dengan usaha tanaman bahan makanan sebesar 54,64 persen terdiri dari usaha tanaman pangan sebesar 30,67 dan usaha hortikultura sebesar 23,97 persen. Kabupaten Manokwari juga memiliki presentase relatif tinggi untuk rumah tangga usaha pertanian dengan sumber pendapatan utama dari perkebunan dan peternakan yaitu sebesar 16,67 persen dan 8,43 persen.



Gambar 5.1

Persentase RTUP Menurut Sumber Pendapatan Utama dan Kabupaten/Kota, 2013 (%)

Sumber : Hasil Olah ST dan SPP 2013

Kedaulatan pangan (khususnya padi) di Papua Barat cukup kuat. Meskipun demikian, rumah tangga miskin banyak dijumpai di sektor ini, tidak terkecuali rumah tangga pertanian dengan pendapatan utama tanaman bahan makanan. Hal ini disebabkan tingkat kecukupan dari pendapatan utama berasal dari usaha tanaman bahan makanan cukup bervariasi. Banyak yang dijumpai petani Papua Barat yang pendapatan usaha pertaniannya hanya untuk memenuhi kebutuhan sendiri.

Sekitar kurang dari 1 persen, rumah tangga usaha pertanian yang merasa tingkat kecukupan dari usaha pertanian untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga adalah sangat berlebih. Dari sisi kecukupan ini, rumah tangga usaha perkebunan, kehutanan, dan jasa pertanian merupakan persentase terkecil dari rumah tangga yang mengatakan kecukupan pangan sangat berlebih dari hasil pertaniannya..

Rumah tangga usaha pertanian dengan pendapatan utama dari usaha hortikultura, peternakan, dan perikanan tercatat di atas 1 persen yang merasa sangat berlebih dari usaha pertanian untuk memenuhi kebutuhan hidup. Rumah tangga dari pendapatan utama sektor non pertanian tercatat hanya 0,14 persen.

Sebagian besar rumah tangga mengaku cukup dari hasil pertaniannya (69,98 persen), tertinggi di usaha hortikultura dan perkebunan atau masing-masing 74,09 persen dan 71,68 persen. Sementara lebih dari 15 persen mengaku tingkat kecukupannya kurang untuk memenuhi kebutuhan hidup. Rumah tangga dengan pendapatan yang mengaku kurang hasil pertaniannya untuk memenuhi kebutuhan hidup terbesar dari usaha jasa pertanian sebanyak 41,49 persen. Sementara, kurang dari 2 persen rumah tangga usaha pertanian dengan sumber pendapatan utama sektor pertanian di Papua Barat mengaku tingkat kecukupannya parah atau sangat kurang, terbanyak di usaha kehutanan dan usaha perkebunan atau masing-masing 1,97 persen dan 1,92 persen.

“Sebagian besar rumah tangga mengaku cukup dari hasil pertaniannya. Tertinggi di usaha hortikultura dan perkebunan”

Sumber Pendapatan Utama	Kecukupan Pendapatan				
	Sangat Berlebih	Lebih dari Cukup	Cukup	Kurang	Sangat Kurang
Sektor Pertanian	0,86	11,94	69,98	15,81	1,40
Tanaman Pangan	0,95	7,33	66,50	23,92	1,29
Hortikultura	1,03	8,94	74,09	14,22	1,72
Perkebunan	0,00	17,00	71,68	9,40	1,92
Peternakan	1,10	14,08	70,87	12,85	1,10
Perikanan	1,80	16,49	68,93	12,41	0,37
Kehutanan	0,00	10,08	63,07	24,87	1,97
Jasa Pertanian	0,00	9,22	49,29	41,49	0,00
Sektor Non Pertanian	0,14	12,15	53,81	27,07	6,83
Lainnya	0,00	2,70	56,12	27,70	13,49

Tabel 5.1

Persentase Rumah Tangga Usaha Pertanian menurut Kecukupan Pendapatan dan Sumber Pendapatan Utama 2013(%)

Sumber: Hasil Olah ST dan SPP 2013

B. Tingkat dan Intensitas Kemiskinan Petani

Seberapa jauh tingkat kemiskinan rumah tangga usaha pertanian bisa dilihat dari sisi lain yaitu indeks kemiskinan multidimensi (IKM). Indeks kemiskinan multidimensi berbeda dengan penentuan rumah tangga miskin berdasarkan garis kemiskinan.

Bicara tentang garis kemiskinan adalah angka yang menunjukkan jumlah rupiah minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum makanan yang setara dengan 2100 kilokalori per kapita per hari dan kebutuhan pokok bukan makanan. Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran konsumsi per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin. Kemiskinan yang diliris Badan Pusat Statistik (BPS) mengacu pada metode ini.

Untuk memperkaya kajian kemiskinan, karakteristik rumah tangga miskin bisa dilihat dari angka IKM. IKM adalah indikator yang mengukur kekurangan (deprivation) setiap individu ke dalam 3 dimensi yaitu kesehatan, pendidikan dan standar hidup. Dimensi pendidikan ditentukan oleh 2 indikator yaitu 1. tidak memiliki anggota



keluarga telah menyelesaikan lima tahun pendidikan dan 2. memiliki minimal satu anak usia sekolah (sampai kelas 9) yang putus sekolah. Dimensi kesehatan juga terdiri dari 2 indikator yaitu 1. memiliki setidaknya satu anggota keluarga yang kurang gizi dan 2. memiliki satu atau lebih anak yang meninggal dunia. Dimensi standar hidup terdiri dari 6 indikator yaitu 1. tidak memiliki listrik, 2. tidak memiliki akses air minum, 3. tidak memiliki akses sanitasi yang memadai, 4. menggunakan bahan bakar memasak dari arang dan kayu bakar, 5. memiliki rumah dengan lantai tanah, dan 6. tidak memiliki kendaraan bermotor dan hanya memiliki salah satu dari barang berikut: sepeda, perahu, radio, kulkas dan televisi.

Setiap rumah tangga diberi skor sesuai dengan kekurangan rumah tangganya menurut 10 indikator yang membentuknya. Skor maksimum adalah 100 persen sehingga masing-masing dimensi memiliki penimbang yang sama, yaitu 33,3 persen. Dimensi pendidikan dan kesehatan masing-masing memiliki dua indikator, sehingga setiap komponen memiliki penimbang sebesar 16,7 persen. Sementara dimensi standar hidup memiliki 6 indikator atau setiap indikator memiliki penimbang sebesar 5,6 persen .

Untuk mengidentifikasi kemiskinan rumah tangga secara multidimensional, skor dari 10 komponen indikator untuk setiap rumah tangga dijumlahkan. Sebuah cut off point (c) sebesar 33,3 persen yang setara dengan sepertiga dari indikator tertimbang digunakan untuk membedakan antara RT yang miskin dan tidak miskin secara multidimensional.

- Jika $c > 50\%$, maka RT dan seluruh anggota RT dianggap sangat miskin multidimensional
- Jika $50\% \geq c > 33\%$, maka RT dan seluruh anggota RT dianggap miskin multidimensional.
- Jika $c \leq 33,3\%$, maka RT dan seluruh anggota RT tidak dianggap miskin multidimensional
- Jika $20\% \leq c < 33,3\%$, maka RT dan seluruh anggota RT dianggap rentan miskin multidimensional

IKM merupakan perkalian antara proporsi penduduk yang mengalami kemiskinan dan intensitas kemiskinan individu atau

$$IKM = H \times A$$

dimana:

H : Head count ratio, adalah proporsi penduduk yang miskin didapat dari

$$H = \frac{q}{n}$$

dimana q adalah jumlah orang yang multidimensional miskin

n adalah total populasi

A : Intensitas Kemiskinan, mencerminkan proporsi tertimbang dari indikator, atau rata-rata kekurangan dari orang-orang miskin. Untuk rumah tangga miskin saja, nilai kekurangan dijumlahkan dan dibagi dengan jumlah total orang miskin didapat dari

$$A = \frac{\sum_1^q c}{q}$$

dimana q adalah jumlah orang yang multidimensional miskin

c adalah skor kekurangan masing-masing RT

Sumber Pendapatan Utama	Status Miskin Multidimensi			
	Tidak Miskin Multidimensi	Rentan Miskin Multidimensi	Miskin Multidimensi	Sangat Miskin Multidimensi
Sektor Pertanian	40,87	25,28	29,59	4,26
Tanaman Pangan	32,53	27,47	33,31	6,69
Hortikultura	43,38	28,38	24,62	3,62
Perkebunan	39,09	23,67	32,69	4,55
Peternakan	59,23	24,42	15,85	0,50
Perikanan	47,03	19,94	30,65	2,38
Kehutanan	30,98	24,78	38,14	6,11
Jasa Pertanian	63,48	27,30	9,22	0,00
Sektor Non Pertanian	72,29	18,09	8,89	0,73
Lainnya	79,32	10,07	10,61	0,00

Tabel 5.2

Persentase RTUP Menurut Sumber Pendapatan Utama dan Kategori Kemiskinan Multidimensional 2013 (%)

Sumber : Hasil Olah ST dan SPP 2013

Berdasarkan kemiskinan multidimensional, rumah tangga yang dianggap miskin secara multidimensional dengan sumber pendapatan utama sektor pertanian mencapai 29,59 persen. Presentase tertinggi di rumah tangga dengan sumber pendapatan utama usaha kehutanan (38,14 persen). Rumah tangga usaha pertanian dengan sumber pendapatan utama usaha tanaman pangan menduduki peringkat kedua miskin multidimensi yaitu sebesar 33,31 persen lalu diikuti oleh perkebunan sebesar 32,69 persen.

Rumah tangga dengan tingkat kemiskinan multidimensional terparah ada di usaha tanaman pangan (6,69 persen), sedangkan usaha peternakan dan jasa pertanian di bawah 1 persen. Sementara, rumah tangga yang rentan jatuh miskin multidimensional sebesar 25,28 persen, tertinggi di usaha hortikultura (28,38 persen) diikuti usaha tanaman pangan (27,47 persen) dan usaha jasa pertanian (27,30 persen).

Berdasarkan kelompok rata-rata pendapatan per bulan, semakin rendah pendapatan yang diterima dari usaha pertanian, semakin besar rumah tangga yang jatuh miskin maupun rentan miskin secara multidimensional. Tercatat, pada rumah tangga dengan rata-rata pendapatan per bulan dari usaha pertanian kurang dari 1 juta rupiah, lebih dari 30 persen rumah tangga yang mengalami miskin multidimensional dan rentan jatuh miskin multidimensional. Angka itu lebih tinggi dibanding rumah tangga yang berpendapatan di atas 3 juta rupiah. Kurang dari 20 persen rumah tangga dengan pendapatan di atas 3 juta rupiah mengalami rentan dan miskin multidimensional.

Tabel 5.3

Persentase RTUP Menurut Kelompok Rata-Rata Pendapatan per Bulan dan Kategori Kemiskinan Multidimensional 2013 (%)

Kelompok Pendapatan	Status Miskin Multidimensi			
	Tidak Miskin Multidimensi	Rentan Miskin Multidimensi	Miskin Multidimensi	Sangat Miskin Multidimensi
< 1 juta	21,21	30,20	43,80	4,79
1 - 2 juta	33,59	26,22	35,13	5,06
2 - 3 juta	52,41	24,24	20,27	3,08
≥ 3 juta	69,00	18,16	11,16	1,67

Sumber : Hasil Olah ST dan SPP 2013

“Semakin luas lahan yang dikuasai, semakin kecil rumah tangga usaha pertanian yang jatuh miskin secara multidimensional”

Tidak jauh berbeda dengan kategori pendapatan, dari sisi luas lahan yang dikuasai, semakin luas lahan yang dikuasai, semakin kecil rumah tangga usaha pertanian yang jatuh miskin secara multidimensional. Rumah tangga yang menguasai lahan pertanian kurang dari 0,25 Ha tercatat mempunyai persentase miskin multidimensional sebesar 32,22 persen, sedangkan yang menguasai lahan pertanian dengan luas di atas 2,5 Ha sebesar 16,10 persen. Sedangkan untuk rumah tangga usaha pertanian yang mengalami rentan jatuh miskin multidimensional, persentase tertinggi ada di rumah tangga yang menguasai lahan 0,50-0,99 Ha. Rumah tangga usaha pertanian dengan penguasaan lahan di atas 2,5 Ha memiliki persentase terkecil rumah tangga rentan jatuh miskin multidimensional yaitu sebesar 19,62 persen.

Tabel 5.4

Persentase RTUP Menurut Luas Lahan dan Kategori Kemiskinan Multidimensional 2013 (%)

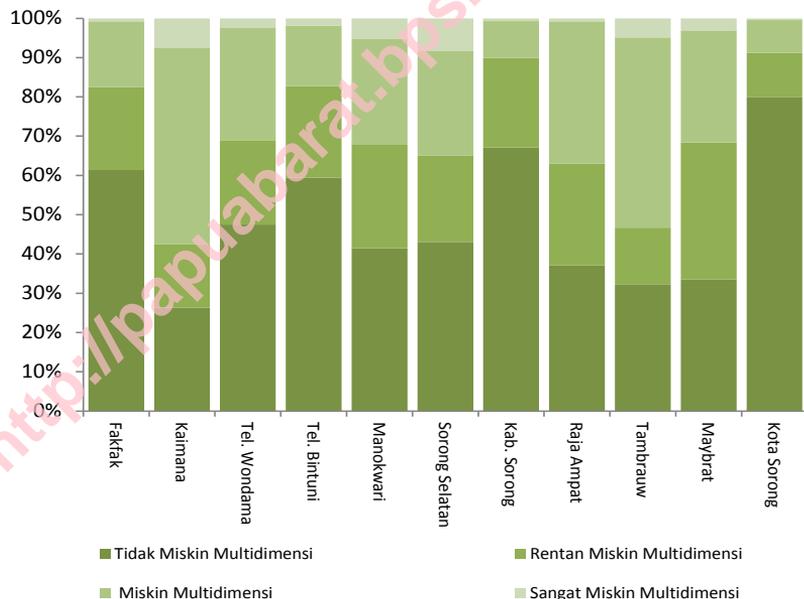
Luas Lahan	Status Miskin Multidimensi			
	Tidak Miskin Multidimensi	Rentan Miskin Multidimensi	Miskin Multidimensi	Sangat Miskin Multidimensi
< 0,25 Ha	38,63	24,16	32,22	4,99
0,25 - 0,49 Ha	48,40	23,66	23,31	4,64
0,50 - 0,99 Ha	51,52	25,39	19,93	3,16
1,00 - 2,49 Ha	51,08	24,73	22,19	2,00
≥ 2,5 Ha	62,89	19,62	16,10	1,39

Sumber : Hasil Olah ST dan SPP 2013

Maka bisa dimengerti, mengapa rumah tangga miskin di Papua Barat sebagian besar adalah petani gurem atau petani dengan luas lahan sawah yang dikuasai kurang dari 0,5 Ha. Dikatakan gurem, karena selain penguasaan lahannya sempit (kurang dari 0,5 Ha), juga mempunyai pendapatan dari hasil usaha pertanian yang rendah.

Kabupaten Kaimana memiliki presentase rumah tangga usaha pertanian miskin multidimensional tertinggi yaitu 50,02 persen. Daerah pemekaran baru juga mempunyai persentase rumah tangga miskin multidimensional yang relatif tinggi. Persentase rumah tangga miskin multidimensional tertinggi kedua adalah di Kabupaten Maybrat (48,44 persen). Daerah pemekaran baru masih berupaya untuk melaksanakan pembangunan secara efektif dan efisien. Masih banyaknya daerah terisolir dan keadaan infrastruktur yang masih minim membuat masih banyaknya masyarakat yang tergolong miskin multidimensi.

"Intensitas kemiskinan dengan subyek rumah tangga usaha pertanian di Papua Barat tahun 2013 tercatat sebesar 0,41"



Gambar 5.2
 Persentase Rumah Tangga Usaha Pertanian Menurut Kabupaten/ Kota dan Kategori Kemiskinan Multidimensional, 2013 (%)

Sumber : Hasil Olah ST dan SPP 2013

Penghitungan kemiskinan dengan metode IKM ini, juga menghasilkan indikator yang disebut intensitas kemiskinan. Intensitas kemiskinan di Papua Barat dengan subyek rumah tangga usaha pertanian di Papua Barat tahun 2013 tercatat sebesar 0,41. Angka itu menunjukkan bahwa rata-rata orang miskin mengalami kekurangan multidimensional di Papua Barat sebesar 41 persen dari 10 indikator kemiskinan (terdiri dari 2 indikator dimensi pendidikan, 2 indikator dimensi kesehatan, dan 6 indikator standar hidup layak).

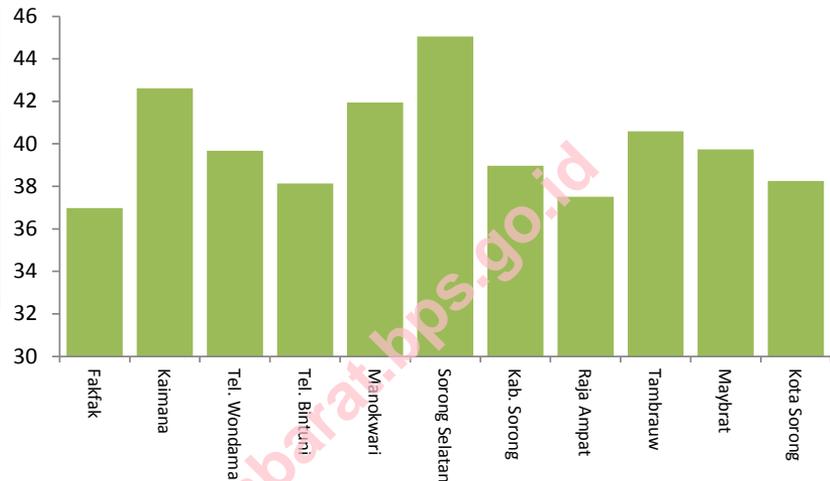
Jika dicermati disparitas intensitas kemiskinan antar kabupaten/kota, ternyata cukup besar variasinya. Intensitas kemiskinan atau rata-rata orang miskin mengalami kekurangan multidimensional di kabupaten/kota di Papua Barat pada tahun 2013

tercatat sekitar 37 – 45 persen. Kabupaten Sorong Selatan memiliki intensitas kemiskinan tertinggi yaitu 45 persen, sedangkan Kabupaten Fak-Fak memiliki intensitas terendah yaitu 37 persen. Kota Sorong juga memiliki intensitas kemiskinan relatif rendah yaitu 38 persen. Diduga lapangan kerja yang cukup banyak di wilayah kota atau wilayah maju dan balas jasa yang relatif tinggi menyebabkan intensitas kemiskinan di wilayah tersebut relatif rendah.



Gambar 5.3

Rata-rata Kekurangan Rumah Tangga Usaha Pertanian yang Miskin Multidimensional Menurut Kabupaten/Kota, 2013 (%)



Sumber: Hasil Olah ST dan SPP 2013

C. Kemiskinan Multidimensi

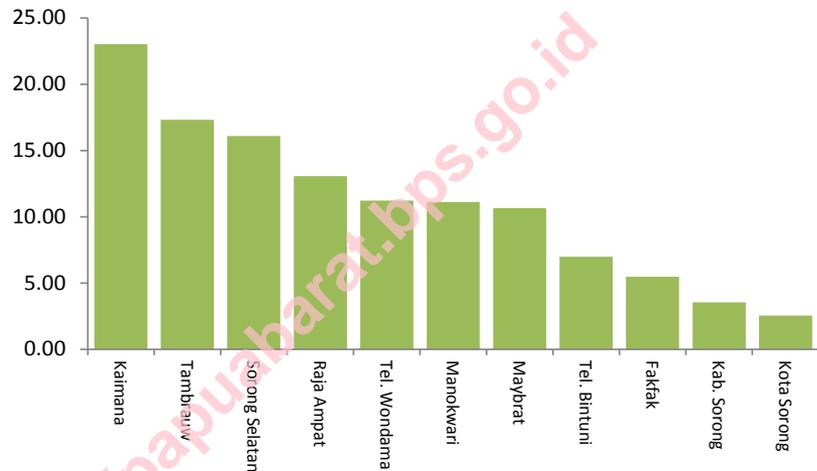
Dengan melakukan penghitungan kemiskinan menggunakan metode indeks kemiskinan multidimensi (IKM), akan diketahui juga sebaran kemiskinan multidimensional. Kemiskinan ini dipicu dari pola kekurangan pada dimensi pendidikan, dimensi kesehatan dan dimensi standar hidup layak.

Harapannya, dengan memetakan IKM, akan diperoleh kantong-kantong kemiskinan multidimensional. Maka barang tentu kemiskinan yang terjadi di daerah tersebut lebih disebabkan karena kekurangan multidimensional meliputi kekurangan pendidikan layak, kekurangan kesehatan layak dan kekurangan standar hidup layak.

IKM Papua Barat sebesar 10,06 persen hal ini berarti rumah tangga dan seluruh anggota rumah tangga tidak dianggap miskin multidimensional. Jika dilihat kabupaten/kota hanya Kabupaten Kaimana yang memiliki IKM di atas 20 persen yang berarti rumah tangga dan seluruh anggota rumah tangga dianggap rentan miskin multidimensional. Kota Sorong memiliki IKM paling rendah yaitu 2,55 persen, hal tersebut sesuai dengan kondisi Kota Sorong yang jauh lebih baik dimensi pendidikan, dimensi kesehatan dan dimensi standar hidup layak dibandingkan dengan kabupaten lain.



Walaupun IKM Papua Barat relatif rendah tetapi perlu selalu diadakan pendekatan sosial khusus agar kebijakan mengurangi kemiskinan di Papua Barat tersebut bisa berhasil dengan baik terutama di daerah pemekaran baru. Pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan, listrik, air bersih, fasilitas kesehatan dan pendidikan perlu dipercepat. Pendekatan kultural agar diutamakan, karena mayoritas penduduk di wilayah Papua Barat mempunyai karakteristik yang hampir sama. Mayoritas penduduk bermata pencaharian sebagai petani, maka Pemerintah Daerah perlu membuat kebijakan yang mendukung pertanian di wilayahnya masing-masing, baik kebijakan yang mendukung peningkatan produksi maupun kebijakan yang membantu pemasaran produk pertanian.



Gambar 5.4

Indeks Kemiskinan Multidimensi (IKM) Menurut Kabupaten/Kota, 2013 (%)

Sumber: Hasil Olah ST dan SPP 2013

6

KETAHANAN PANGAN RUMAH TANGGA USAHA PERTANIAN



BAB 6

Ketahanan Pangan Rumah Tangga Usaha Pertanian

"Landasan konstitusi mengenai ketahanan pangan ada pada Undang-undang Republik Indonesia No 18 tahun 2012."



A. Kekhawatiran Akan Kekurangan Pangan

Undang-undang Republik Indonesia No 18 tahun 2012 tentang Pangan menyebutkan bahwa pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai komponen dasar untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas.

Dalam undang-undang disebutkan bahwa Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.

Sekitar 23 persen rumah tangga usaha pertanian dengan pendapatan utama sektor pertanian di Papua Barat mengaku ketahanan pangannya kurang baik. Mereka tidak mempunyai cukup persediaan pangan, sehingga untuk mencukupi kekurangan ketersediaan pangan, dilakukan dengan membeli atau berasal dari bantuan rumah tangga lainnya.

Kenyataan ini menguatkan bahwa rumah tangga pertanian di Papua Barat banyak yang didominasi oleh petani gurem. Penguasaan lahan yang tidak begitu luas, menyebabkan hasil pertanian yang diperoleh tidak mencukupi untuk memenuhi persediaan pangan keluarga. Rumah tangga usaha pertanian tanaman bahan makanan (tanaman pangan dan hortikultura) yang merupakan primadona juga mengalami hal yang sama atau lebih dari 35 persen mengaku hasil tanaman bahan makannya tidak mencukupi sebagai persediaan pangan keluarga.

“Hampir 12 persen dari RTUP dengan pendapatan utama sektor pertanian mengaku pernah mengalami kekurangan pangan.”

Sumber Pendapatan Utama	Dimensi Ketersediaan Pangan		
	Tidak Mempunyai Cukup Persediaan Pangan	Mengalami Kekurangan Pangan	Merasa Takut Kekurangan Pangan
Sektor Pertanian	23,18	11,97	8,12
Tanaman Pangan	11,18	10,56	7,88
Hortikultura	27,06	18,97	8,33
Perkebunan	25,50	20,88	5,36
Peternakan	31,63	0,00	8,11
Perikanan	26,04	3,06	9,84
Kehutanan	26,53	18,70	12,85
Jasa Pertanian	37,94	0,00	9,93
Sektor Non Pertanian	23,05	1,91	9,14
Lainnya	36,69	0,00	0,00

Tabel 6.1

Persentase Rumah Tangga Usaha Pertanian menurut Dimensi Ketersediaan Pangan, 2013 (%)

Sumber : Hasil Olah ST dan SPP 2013

Bahkan hampir 12 persen dari rumah tangga usaha pertanian dengan pendapatan utama sektor pertanian mengaku pernah mengalami kekurangan pangan. Bagi petani gurem, rata-rata persediaan pangan biasanya hanya mampu dimanfaatkan dalam waktu yang relatif singkat. Jika terjadi anomali cuaca dan serangan hama, maka sebagian dari petani ini akan mengalami kekurangan pangan. Rumah tangga usaha pertanian dengan pendapatan utama usaha tanaman bahan makanan yang pernah mengalami kekurangan pangan sebesar 29,53 persen. Sedangkan rumah tangga usaha pertanian dengan pendapatan utama usaha peternakan dan jasa pertanian mengaku tidak pernah mengalami kekurangan pangan

Tidak adanya kepastian umumnya memicu petani mengalami ketakutan kekurangan pangan. Hasil hutan yang tidak menentu dan relatif sulit untuk didapat mengakibatkan rumah tangga usaha pertanian dengan pendapatan utama kehutanan memiliki presentase tertinggi merasa takut kekurangan pangan (12,85 persen). Kondisi alam yang sering tidak bersahabat dengan nelayan juga menyebabkan rumah tangga usaha perikanan yang mengaku takut kekurangan pangan merupakan terbanyak kedua dibandingkan usaha pertanian lainnya atau 12,85 persen.

Dengan mencermati dan menganalisa dimensi ketersediaan pangan ini, disimpulkan bahwa masih ada rumah tangga yang tidak mempunyai ketersediaan pangan yang cukup, yang merasa kekurangan pangan dan takut kekurangan pangan. Oleh sebab itu, Pemerintah Daerah beserta stakeholder jajarannya, harus bersinergi dalam berbagai program pertanian agar dalam rumah tangga usaha pertanian terwujud ketahanan pangan, dan selanjutnya terwujud ketahanan pangan di seluruh Papua barat.

B. Petani Papua Barat Mampu Menjangkau dan Memanfaatkan Pangan

Setelah melihat dimensi ketersediaan pangan, tak kalah pentingnya untuk menelaah kemampuan menjangkau dan memanfaatkan pangan bagi rumah tangga pertanian di Papua Barat atau dimensi keterjangkauan pangan.

Tujuan dari upaya ketahanan pangan selain terpenuhinya kebutuhan pangan, akses menjangkau dan memanfaatkan pangan harus bisa dinikmati oleh seluruh rumah tangga tanpa terkecuali yang tinggal di daerah-daerah sulit dan terpelosok.

Dilihat dari dimensi keterjangkauan pangan, lebih dari 20 persen rumah tangga dengan sumber pendapatan utama sektor pertanian mengaku kesulitan menjangkau pangan karena pangan tidak diproduksi di kecamatan. Dikarenakan infrastruktur yang masih minim, sehingga menghambat distribusi bahan pangan.

Kenyataan itu mengakibatkan banyak petani yang memanfaatkan hasil produksi pertaniannya sendiri (pertanian subsisten). Banyak dari mereka yang merasa sulit untuk memenuhi kebutuhan pangan selain yang diproduksi sendiri karena jalur transportasi yang masih buruk. Maka membangun infrastruktur jalan oleh pemerintah adalah sangat penting karena sangat membantu petani.

“Lebih dari 20 persen rumah tangga dengan sumber pendapatan utama sektor pertanian mengaku kesulitan menjangkau pangan karena pangan tidak diproduksi di kecamatan.”

Sumber Pendapatan Utama	Dimensi Keterjangkauan Pangan		
	Pangan Tidak Diproduksi di Kecamatan	Kesulitan Menjangkau Lokasi Pembelian	Harga Pembelian Tinggi
Sektor Pertanian	20,94	33,30	57,83
Tanaman Pangan	10,52	42,73	55,92
Hortikultura	20,25	35,11	48,72
Perkebunan	25,20	43,30	69,39
Peternakan	4,97	13,45	36,43
Perikanan	35,81	24,72	67,54
Kehutanan	19,12	31,49	47,62
Jasa Pertanian	45,39	13,08	50,47
Sektor Non Pertanian	26,60	15,96	35,15
Lainnya	14,21	9,61	43,23

Tabel 6.2

Persentase Rumah Tangga Usaha Pertanian menurut Dimensi Keterjangkauan Pangan, 2013 (%)

Sumber : Hasil Olah ST dan SPP 2013

Rumah tangga usaha pertanian dengan pendapatan utama jasa pertanian merupakan terbanyak yang merasa kesulitan menjangkau pangan karena pangan tidak diproduksi di kecamatan (45,39 persen). Sementara rumah tangga usaha pertanian dengan pendapatan utama dari usaha peternakan dan tanaman pangan merupakan yang tersedikit merasakan kesulitan menjangkau pangan karena pangan tidak diproduksi di kecamatan.

Kesulitan menjangkau pangan karena lokasi yang jauh tercatat di atas 30 persen, sedangkan rumah tangga dengan pendapatan utama sektor pertanian yang mengaku kesulitan keterjangkauan pangan karena harga pembelian yang tinggi lebih dari 50 persen. Inflasi yang terjadi di perdesaan sangat dirasakan oleh petani. Apalagi pendapatan petani relatif rendah dibanding profesi lainnya.



Sumber Pendapatan Utama	Dimensi Pemanfaatan Pangan			
	Ada Balita yang Kurang Gizi	Ada Balita yang Meninggal Karena Sakit	Sumber Air Minum Dari Air Sungai/Hujan/Lainnya	Sumber Air Utama Masak Dari Air Sungai/Hujan/Lainnya
Sektor Pertanian	2,38	2,88	35,20	37,05
Tanaman Pangan	2,52	3,32	31,61	33,67
Hortikultura	2,06	1,34	36,32	41,09
Perkebunan	3,44	2,25	34,25	33,38
Peternakan	0,80	6,31	27,19	26,23
Perikanan	1,89	2,13	31,33	32,97
Kehutanan	2,67	8,62	64,03	65,20
Jasa Pertanian	0,00	9,22	62,41	62,41
Sektor Non Pertanian	1,99	1,06	36,65	42,18
Lainnya	0,00	0,00	20,68	20,86

Tabel 6.3

Persentase Rumah Tangga Usaha Pertanian menurut Dimensi Pemanfaatan Pangan, 2013 (%)

Sumber: Hasil Olah ST dan SPP 2013

Dari sisi pemanfaatan pangan, persentase rumah tangga usaha pertanian yang terdapat balita kurang gizi dengan pendapatan utama sektor pertanian sebesar 2,38 persen. Diduga rumah tangga tersebut merupakan rumah tangga miskin, karena kemampuan untuk memanfaatkan pangan sangat terbatas.

Selain itu, masih dijumpai rumah tangga usaha pertanian dengan pendapatan utama sektor pertanian yang menggunakan sungai dan hujan sebagai sumber air minum dan memasak atau di atas 35 persen. Penggunaan air sungai dan hujan untuk kepentingan air minum dan memasak dijumpai di seluruh kategori usaha pendapatan utama.

Untuk meningkatkan kualitas hidup rumah tangga usaha pertanian, Pemerintah Daerah perlu mengupayakan peningkatan kesehatan balita melalui program-program kesehatan masyarakat hingga ke pelosok. Di samping itu Pemerintah harus menyediakan air bersih dan layak minum/memasak bagi rumah tangga usaha pertanian, khususnya di wilayah sulit dan terpelosok seperti pegunungan, kawasan hutan dan kepulauan.

C. Ketahanan Pangan Yang Masih Tertinggal

Untuk mengetahui ketahanan pangan suatu daerah dilakukan pendekatan dengan menghitung Indeks Ketahanan Pangan. Indeks ini terdiri dari tiga dimensi yaitu dimensi ketersediaan pangan, keterjangkauan akses pangan dan pemanfaatan pangan.

Pengertian ketersediaan pangan dalam UU No.18 tahun 2012 adalah kondisi tersedianya pangan dari hasil produksi dalam negeri dan cadangan pangan nasional serta impor apabila kedua sumber utama tidak dapat memenuhi kebutuhan. Dimensi ketersediaan pangan diwakili oleh aspek kecukupan persediaan pangan, aspek kekurangan pangan, dan aspek ketakutan kekurangan pangan.

Aspek kekurangan pangan merupakan kondisi tidak mampu mengonsumsi makanan sesuai kebiasaannya atau tidak mampu mempertahankan pola makan normal setiap saat dan merubah pola makan secara terpaksa seperti melewati makan, makan lebih sedikit, makan lebih murah, dan mungkin beralih makanan yang kurang bergizi.

Aspek ketakutan kekurangan pangan dipakai untuk menghitung indikator seberapa dalam tingkat rasa ketakutan suatu rumah tangga terhadap kekurangan pangan. Dimensi keterjangkauan akses pangan adalah kemampuan rumah tangga untuk memperoleh cukup pangan, baik yang berasal dari produksi sendiri, stok, pembelian, barter, hadiah, pinjaman dan bantuan pangan. Ketersediaan pangan di suatu daerah mungkin mencukupi, akan tetapi tidak semua rumah tangga memiliki akses yang memadai baik secara kuantitas maupun keragaman pangan.

Dimensi keterjangkauan terdiri dari satu aspek yaitu aspek keterjangkauan fisik, ekonomi, dan sosial. Aspek ini dibentuk oleh tiga indikator yaitu indikator pangan yang diproduksi di kecamatan, indikator tidak mengalami kesulitan menjangkau lokasi pembelian, dan indikator harga pembelian tidak tinggi.

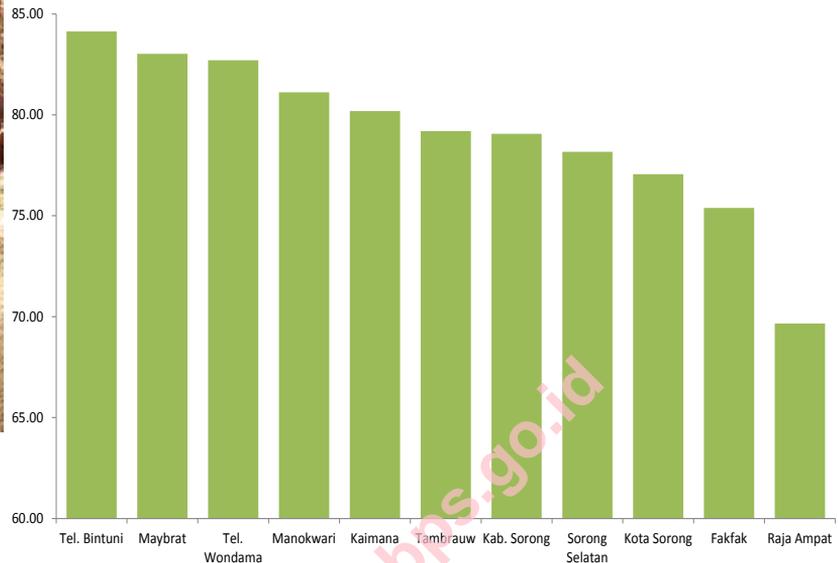
Pemanfaatan pangan meliputi penggunaan pangan oleh rumah tangga serta meliputi cara penyimpanan, pengolahan dan penyiapan makanan, termasuk penggunaan air serta meliputi status kesehatan anggota rumah tangga. Dimensi pemanfaatan pangan diwakili dua aspek yaitu kecukupan asupan untuk melihat status kesehatan yang diukur dengan dua indikator yaitu tidak ada balita yang kurang gizi dan tidak ada balita yang meninggal karena sakit. Aspek yang kedua adalah kualitas air yang diukur oleh dua indikator yaitu sumber air minum utama dan sumber air masak utama.

Dari hasil penghitungan indeks ketahanan pangan di Papua Barat menunjukkan bahwa indeks dimensi ketersediaan pangan tercatat sebesar 92,91, sedangkan indeks dimensi keterjangkauan pangan dan indeks pemanfaatan pangan masing-masing 81,80 dan 62,85. Dengan demikian indeks ketahanan pangan di Papua Barat adalah 79,19, artinya ketahanan pangan di Papua Barat relatif cukup. Jika dilihat secara spasial, masih ada satu kabupaten/kota mempunyai indeks ketahanan pangan berkategori kurang, yaitu Kabupaten Raja Ampat.

“Dari hasil penghitungan indeks ketahanan pangan di Papua Barat menunjukkan bahwa indeks dimensi ketersediaan pangan tercatat sebesar 92,91.”



Gambar 6.1
Indeks Ketahanan Pangan (IKP) Menurut Kabupaten/Kota, 2013 (%)



Sumber: Hasil Olah ST dan SPP 2013

Terdapat 5 kabupaten/kota yang mempunyai indeks ketahanan pangan di atas Papua Barat, dan sisanya 6 kabupaten/kota di bawah Papua Barat. Ketahanan pangan tertinggi tercatat di Teluk Bintuni atau mempunyai indeks ketahanan pangan sebesar 84,13, diikuti oleh Kabupaten Maybrat sebesar 83,02. Sedangkan indeks ketahanan pangan terendah tercatat di Kabupaten Raja Ampat sebesar 69,66. Rendahnya IKP Kabupaten Raja Ampat disebabkan dimensi keterjangkauan akses pangan yang sangat rendah, hal ini disebabkan karena bentuk wilayah Kabupaten Raja Ampat yang merupakan kepulauan kecil.

Berdasarkan analisa indeks ketahanan pangan ini, diharapkan Pemerintah sangat konsen terhadap kondisi sosial ekonomi petani. Kemiskinan dan ketahanan pangan ternyata sangat rentan pada rumah tangga dengan kondisi luas lahan pertanian yang dikuasai tidak begitu luas (gurem) dan yang mempunyai pendapatan dari hasil pertanian kurang dari 5 juta rupiah ke bawah.

Maka memberdayakan petani untuk maju hendaknya dimulai dari upaya mensejahterakan rumah tangga usaha pertanian yang berpenghasilan rendah dengan penguasaan lahan sempit (di bawah 0,5 Ha), karena sejatinya kontribusi kemiskinan dan ketahanan pangan yang rapuh berasal dari rumah tangga yang demikian.



KESIMPULAN



BAB 7

Kesimpulan

“Tanaman Bahan Makanan merupakan usaha yang paling banyak diusahakan di kabupaten/kota di Papua Barat.”



A. Kesimpulan

Sektor pertanian adalah sektor yang sangat penting bagi kelangsungan perekonomian suatu bangsa. Bangsa yang kuat selalu menjadikan sektor pertanian sebagai ujung tombak disamping memajukan sektor lain. Seiring meningkatnya populasi penduduk, persoalan ketahanan pangan dan kedaulatan pangan tidak bisa terhindari.

Tidak tanggung-tanggung, persoalan ketahanan pangan maupun kedaulatan pangan ini, berpengaruh pada multi-dimensi ipoleksosbudhankam. Maka menjaga kestabilan ketahanan pangan adalah penting, karena itu termasuk menjaga stabilitas ekonomi secara makro dan stabilitas negara.

Melalui Sensus Pertanian (ST) 2013, Pemerintah mencoba untuk menata pembangunan pertanian. Hasil-hasil ST2013 akan menjadi bench mark perencanaan dan evaluasi pembangunan pertanian. Untuk mendapatkan gambaran yang komprehensif tentang kondisi sosial ekonomi rumah tangga pertanian, telah dilaksanakan kegiatan Survei Pendapatan Rumah Tangga Usaha Pertanian (SPP) 2013 sebagai lanjutan kegiatan ST2013.

Bagi Papua Barat, hasil ST2013 dan analisis hasil SPP2013 sangat ditunggu karena sektor pertanian adalah sektor unggulan dan strategis di Papua Barat. Dengan mengetahui kondisi sosial ekonomi rumah tangga usaha pertanian, Pemerintah Daerah Papua Barat akan memperoleh input bagaimana meningkatkan kesejahteraan rumah tangga pertanian dan menyusun strategi yang tepat dan terarah guna pembangunan sektor pertanian ke depan.

Dari hasil SPP2013 diketahui bahwa tidak sedikit anggota rumah tangga usaha pertanian bekerja di luar sektor pertanian untuk membantu kehidupan keluarganya. Bagi rumah tangga usaha pertanian, mengandalkan usaha dari pertanian saja tidak cukup.

Hal ini diperkuat dari data rata-rata pendapatan yang dihasilkan dari pertanian sebagai lapangan/usaha utama rumah tangga sebesar 16,69 juta rupiah per tahun, lebih rendah dibanding pendapatan dari bukan pertanian sebesar 20,72 juta rupiah per tahun. Rendahnya balas jasa di sektor pertanian, menyebabkan banyak anggota rumah tangga pertanian ikut bekerja di sektor lainnya untuk menambah pendapatan rumah tangga.

Dari sisi pendidikan, sekitar 64,45 persen petani di Papua Barat adalah belum pernah sekolah atau tamatan SD. Faktor kemiskinan adalah yang diduga sebagai penyebab utama rendahnya pendidikan di level petani. Ketidakmampuan untuk bersekolah menyebabkan banyak yang memilih untuk tidak meneruskan pendidikan jenjang yang lebih tinggi.

Jika dilihat lebih mendalam, pada usia 10-17 tahun (disebut usia anak) terdapat 43,21 persen anak yang sudah bekerja. Konsekuensi adanya pekerja anak di rumah tangga usaha pertanian yang tidak sekolah lagi di usia sekolah (10-17 tahun) sebesar 9,50 persen. Bahkan terdapat 3,00 persen yang tidak pernah sekolah, dan sangat besar kemungkinannya kasus ini berasal dari keluarga yang miskin.

Dari seluruh rumah tangga usaha pertanian, sebanyak 53,50 persen adalah petani gurem atau petani yang menguasai lahan pertanian di bawah 0,5 Ha. Jumlah rumah tangga petani gurem ini sedikit bertambah 1,59 persen dibanding kondisi 10 tahun lalu sebesar 51,91 persen (hasil ST2003). Sebagian besar lahan yang dimiliki rumah tangga usaha pertanian belum mempunyai surat tanda bukti kepemilikan lahan, di bawah 40 persen baik perkotaan maupun perdesaan.

Rumah tangga usaha pertanian yang mempunyai lahan kurang dari 0,25 Ha dan mempunyai pendapatan di bawah 5 juta rupiah dalam setahun (perkotaan+perdesaan) adalah sebanyak 39,60 persen, sedangkan yang mempunyai pendapatan lebih dari 15 juta rupiah hanya sebesar 22,31 persen. Selanjutnya bergerak alami, semakin luas lahan yang dikuasai, semakin dominan jumlah rumah tangga yang memiliki pendapatan lebih besar, hingga tercatat pada penguasaan lahan di atas 2,5 Ha tercatat 62,42 persen yang memiliki pendapatan di atas 15 juta rupiah. Pola ini juga terjadi pada rumah tangga di perkotaan dan perdesaan secara spasial.

Disadari bahwa memang tidak semua subsektor di pertanian selalu membutuhkan modal yang besar sebagai faktor pelancarnya. Jika ditelaah menurut sumber pendapatan utama rumah tangganya; tanaman pangan, hortikultura juga perikanan boleh dibilang sebagai subsektor papan atas yang berhasil menarik perhatian beberapa bank untuk mengucurkan kreditnya. Rumah tangga yang berusaha di subsektor ini relatif lebih mudah mendapatkan bantuan kredit dibanding yang lain. Hal ini wajar mengingat kebutuhan modal serta omset yang dihasilkan oleh subsektor ini relatif lebih besar dibandingkan subsektor lain, misalnya peternakan.

Dari seluruh rumah tangga yang usaha pertanian yang pernah mengajukan fasilitas kredit, lebih dari 50 persen mengalami kesulitan pengajuan kredit karena menganggap proses administrasi rumit. Diduga karena faktor SDM petani yang



rendah, menyebabkan petani merasa sangat berat dan grogi berhadapan dengan petugas pemberi kredit sehingga mereka menganggap bahwa proses administrasinya rumit. Mereka sangat kesulitan untuk mengisi berkas-berkas atau formulir pengajuan kredit. Oleh karena itu sebagaimana telah diterangkan sebelumnya, maka upaya peningkatan SDM petani adalah sangat penting. Proses administrasi pada pelayanan kredit akan menjadi mudah jika petani mempunyai SDM yang baik. Tentunya didukung oleh pemberi fasilitas dengan mempermudah proses administrasi.

Selain kredit, persentase rumah tangga usaha pertanian yang memperoleh bantuan, hibah dan subsidi relatif masih rendah. Rumah tangga yang memperoleh bantuan/hibah/subsidi untuk semua sektor usaha pertanian di bawah 30 persen. Agaknya bantuan, hibah dan subsidi masih belum dirasakan petani secara luas dan merata, khususnya petani-petani di daerah sulit dan terpelosok yang jauh dari sarana dan prasarana produksi pertanian. Bantuan/hibah/subsidi yang dimaksud meliputi pembiayaan, bibit/benih, pupuk, pestisida, alat alat pertanian, kapal/perahu dan bantuan lainnya.

Dari seluruh rumah tangga usaha pertanian, yang pernah mengikuti penyuluhan pertanian kurang dari 25 persen untuk seluruh kategori pendapatan utama. Ini menunjukkan bahwa kebanyakan petani yang memperoleh pengetahuan bertani baru sebatas ilmu yang didapat dari keluarga secara turun temurun (ilmu warisan).

Persentase rumah tangga yang menjadi anggota kelompok tani pada setiap kategori juga tidak lebih dari 45 persen. Di beberapa rumah tangga usaha pertanian, tidak sedikit yang dijumpai mengaku bahwa sebenarnya dalam kelompok taninya tidak ada kegiatan yang berarti (tidak aktif). Nama kelompok taninya dibentuk dengan maksud hanya memenuhi syarat untuk mendapatkan bantuan/hibah/subsidi terutama benih dan pupuk khususnya dari program pemerintah. Masih belum dimengerti dengan baik, manfaat mengikuti kelompok tani yang sesungguhnya.

Dari seluruh rumah tangga yang mengaku mengalami kesulitan akses saprodi, hampir setengahnya disebabkan karena tidak tersedianya saprodi. Kurangnya supplier saprodi di Papua Barat menjadi kendala tersendiri bagi petani untuk mengakses saprodi. Selain itu sebagian rumah tangga mengakui bahwa distribusi saprodi di daerahnya tidak tersedia dengan baik. Penimbunan pupuk sering terjadi, sehingga sering terjadi kelangkaan pupuk yang mengakibatkan harga pupuk mahal. Ketersediaan bibit unggul juga terbatas, karena sebagian besar bibit unggul berasal dari impor.

Berdasarkan kemiskinan multidimensional, IKM Papua Barat sebesar 10,06 persen hal ini berarti rumah tangga dan seluruh anggota rumah tangga tidak dianggap miskin multidimensional. Jika dilihat kabupaten/kota hanya Kabupaten Kaimana yang memiliki IKM di atas 20 persen yang berarti rumah tangga dan seluruh anggota rumah tangga dianggap rentan miskin multidimensional. Kota Sorong memiliki IKM paling rendah yaitu 2,55 persen, hal tersebut sesuai dengan kondisi Kota Sorong yang jauh lebih baik dimensi pendidikan, dimensi kesehatan dan dimensi standar hidup layak dibandingkan dengan kabupaten lain.

Dari hasil penghitungan indeks ketahanan pangan di Papua Barat menunjukkan bahwa indeks dimensi ketersediaan pangan tercatat sebesar 92,91, sedangkan indeks dimensi keterjangkauan pangan dan indeks pemanfaatan pangan masing-masing 81,80 dan 62,85. Dengan demikian indeks ketahanan pangan di Papua Barat adalah 79,19, artinya ketahanan pangan di Papua Barat relatif cukup. Jika dilihat secara spasial, masih ada satu kabupaten/kota mempunyai indeks ketahanan pangan berkategori kurang, yaitu Kabupaten Raja Ampat.

Berdasarkan analisa indeks ketahanan pangan ini, diharapkan Pemerintah sangat konsen terhadap kondisi sosial ekonomi petani. Kemiskinan dan ketahanan pangan ternyata sangat rentan pada rumah tangga dengan kondisi luas lahan pertanian yang dikuasai tidak begitu luas (gurem) dan yang mempunyai pendapatan dari hasil pertanian kurang dari 5 juta rupiah ke bawah. Maka memberdayakan petani untuk maju hendaknya dimulai dari upaya mensejahterakan rumah tangga usaha pertanian yang berpenghasilan rendah dengan penguasaan lahan sempit (di bawah 0,5 Ha), karena sejatinya kontribusi kemiskinan dan ketahanan pangan yang rapuh berasal dari rumah tangga yang demikian.

Isu kemiskinan merupakan hal yang sangat krusial berkaitan pembangunan sektor pertanian. Dari analisis sosial ekonomi rumah tangga usaha pertanian ini, jelas sekali bahwa kesejahteraan rumah tangga usaha pertanian masih jauh dari yang diharapkan khususnya bagi petani gurem. Pendapatan rumah tangga usaha sektor non pertanian jauh lebih baik dibanding usaha pertanian. Jika tidak ditangani dengan baik oleh Pemerintah Daerah, maka percepatan pembangunan pertanian sulit terwujud.

Sebagai kajian akhir dari analisis ini disimpulkan bahwa berdasarkan hasil analisis determinan, besar luas lahan yang dikuasai, persentase petani dengan pendidikan di atas smp, kategori wilayah tempat tinggal, sumber pembiayaan, bantuan/hibah, pemanfaatan sarana koperasi, akses saprodi, akses pemasaran, dan pemberian penyuluhan kepada petani merupakan indikator-indikator yang memberikan dampak positif bagi peningkatan pendapatan rumah tangga usaha pertanian.

Dengan telah mengetahui indikator-indikator utama yang berpengaruh terhadap kesejahteraan petani sebagaimana hasil analisis determinan, maka seyogyanya pihak stakeholder meliputi Pemerintah, swasta dan masyarakat, segera mengaplikasikan berbagai program yang berkaitan dengan indikator-indikator tersebut. Jika program pertanian tercapai dengan baik, maka menjumpai petani kaya di masa mendatang adalah bukan suatu fatamorgana lagi.



Daftar Pustaka

- BPS. (2011). *Indikator Pembangunan Berkelanjutan*. Jakarta: BPS.
- BPS. (2013). *Indikator Pasar Tenaga Kerja Indonesia 2013*. Jakarta: BPS.
- BPS. (2014). *Statistik Daerah Provinsi Papua Barat 2014*. Manokwari: BPS Papua Barat
- BPS. (2014). *Booklet ST2013 Provinsi Papua Barat*. Manokwari: BPS Papua Barat
- Cline, W. (2007). *Global Warming and Agriculture*. Washington, DC: Peterson Institute for International Economics.
- Edame, G., Ekpenyong, A., Fonta, W., & Duru, E. (2011). *Climate Change, Food Security and Agricultural Productivity in Africa: Issues and policy directions*. International Journal of Humanities and Social Science, Vol. 1 No. 21 Special Issue, 205-223.
- Mendelsohn, R. (2008). *The Impact of Climate Change on Agriculture in Developing Countries*. Journal of Natural Resources Policy Research, 1:1, 5-19.
- Menko Perekonomian. (2013). *Laporan Perkembangan Pelaksanaan MP3EI*. Jakarta: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
- Rosenzweig, C., & Parry, M. (1994). *Potential Impact of Climate Change on World Food Supply*. Nature, 367, 133-138.



LAMPIRAN

<http://papua Barat.bps.go.id>



Tabel 1. Presentase Tenaga Kerja Menurut Lapangan Usaha 2009-2013

Lapangan Usaha	2009	2010	2011	2012	2013
1.Pertanian	56.60	54.04	48.48	46.59	48.71
2.Pertambangan dan Penggalian	3.02	2.13	2.65	3.00	2.70
3.Industri Pengolahan	3.74	3.89	3.44	5.12	3.64
4.Listrik, Gas & AirBersih	0.25	0.19	0.07	0.25	0.26
5.Bangunan	4.77	5.06	4.82	4.67	3.65
6.Perdagangan, Hotel dan Restoran	10.39	11.96	16.73	15.56	14.46
7.Pengangkutan dan Komunikasi	4.82	4.75	5.05	5.67	5.50
8.Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan	0.53	0.90	1.30	1.62	1.22
9.Jasa-jasa	15.89	17.08	17.45	17.52	19.86

Tabel 2. Distribusi PDRB (dengan migas) Menurut Lapangan Usaha 2009-2013

Lapangan Usaha	2009	2010	2011	2012	2013
1.Pertanian	23.15	17.36	13.77	12.36	11.65
2.Pertambangan dan Penggalian	0.85	0.69	7.23	6.50	5.69
3.Industri Pengolahan	6.53	4.73	51.66	53.48	54.28
4.Listrik, Gas & AirBersih	0.49	0.36	0.31	0.29	0.30
5.Bangunan	9.25	7.57	6.87	7.26	7.73
6.Perdagangan, Hotel dan Restoran	9.43	7.03	6.49	6.55	6.90
7.Pengangkutan dan Komunikasi	6.88	5.32	4.70	4.73	4.75
8.Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan	2.37	2.07	1.83	1.85	1.98
9.Jasa-jasa	7.88	7.17	7.14	6.97	6.72

Tabel 3. Pertumbuhan Ekonomi Menurut Lapangan Usaha 2009-2013

Lapangan Usaha	2009	2010	2011	2012	2013
1.Pertanian	3.83	6.08	1.66	1.48	3.52
2.Pertambangan dan Penggalian	-0.16	-0.34	6.05	5.52	0.19
3.Industri Pengolahan	56.29	120.02	64.66	27.76	12.19
4.Listrik, Gas & AirBersih	9.03	7.30	8.85	8.81	9.02
5.Bangunan	12.96	9.77	12.24	12.30	11.37
6.Perdagangan, Hotel dan Restoran	6.49	3.99	12.11	9.92	11.76
7.Pengangkutan dan Komunikasi	16.36	10.40	11.88	11.57	10.22
8.Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan	23.68	6.56	11.23	5.88	12.66
9.Jasa-jasa	13.28	20.61	22.54	11.91	8.69
PDRB Migas	13.87	28.47	27.08	15.84	9.30
PDRB Tanpa Migas	9.18	8.52	10.21	7.41	7.83

Tabel 4. Nilai Tukar Petani Menurut Subsektor 2013

Tahun	NTP_N	NTP_H	NTP_PR	NTP_PT	NTP_P
2010	111.17	106.55	119.38	113.78	87.81
2011	112.66	107.44	123.02	114.32	86.92
2012	113.44	104.96	116.92	111.76	83.90
2013	114.19	103.81	114.76	111.70	81.25

Tabel 5. Indeks Kemiskinan Multidimensi Menurut Kabupaten/Kota 2013

Kab/Kota	A	H	IKM
Kab. Fak Fak	0.148	0.370	5.48
Kab. Kaimana	0.540	0.426	23.02
Kab. Teluk Wondama	0.282	0.397	11.20
Kab. Teluk Bintuni	0.183	0.381	6.98
Kab. Manokwari	0.265	0.419	11.12
Kab. Sorong Selatan	0.357	0.450	16.10
Kab. Sorong	0.091	0.390	3.54
Kab. Raja Ampat	0.348	0.375	13.07
Kab. Tambrau	0.427	0.406	17.32
Kab. Maybrat	0.268	0.397	10.65
Kota Sorong	0.067	0.383	2.55
Papua Barat	0.246	0.408	10.06

Tabel 6. Indeks Ketahanan Pangan Menurut Kabupaten/Kota 2013

Kab/Kota	Dimensi Ketersediaan Pangan	Dimensi Keterjangkauan Pangan	Dimensi Pemanfaatan Pangan	IKP	Kriteria
Kab. Fak Fak	94.22	71.36	60.60	75.39	Cukup
Kab. Kaimana	95.69	85.17	59.71	80.19	Cukup
Kab. Teluk Wondama	98.20	96.33	53.56	82.70	Cukup
Kab. Teluk Bintuni	97.77	91.14	63.48	84.13	Tinggi
Kab. Manokwari	93.51	85.01	64.84	81.12	Cukup
Kab. Sorong Selatan	91.84	81.43	61.25	78.17	Cukup
Kab. Sorong	89.29	88.18	59.70	79.06	Cukup
Kab. Raja Ampat	89.00	54.24	65.75	69.66	Kurang
Kab. Tambrau	95.54	79.24	62.81	79.19	Cukup
Kab. Maybrat	96.13	94.38	58.54	83.02	Tinggi
Kota Sorong	85.93	70.80	74.46	77.06	Cukup
Papua Barat	92.91	81.80	62.85	79.19	Cukup



CATATAN TEKNIS

<http://papuabarat.bps.go.id>



Catatan Teknis 1. INDEKS KEMISKINAN MULTIDIMENSI (IKM)

Indeks Kemiskinan Multidimensi (IKM) mengukur kekurangan (deprivation) setiap individu ke dalam 3 dimensi yaitu kesehatan, pendidikan dan standar hidup. Dimensi pendidikan dan kesehatan terdiri dari 2 indikator, sementara dimensi standar hidup terdiri dari 6 indikator. Setiap rumah tangga yang mengalami kekurangan (deprivation) diberi skor 1 dan yang tidak mengalami kekurangan diberi skor 0. Jumlah dari skor setiap rumah tangga menunjukkan kekurangan multidimensi rumah tangga.

Tabel 1. Indikator Penyusun IKM yang Diberi Skor 1 (Menunjukkan Kekurangan)

Dimensi	Indikator
Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> o tidak memiliki anggota keluarga yang telah menyelesaikan pendidikan 9 tahun (SMP)* o memiliki minimal satu anak usia sekolah (sampai kelas 9) yang putus sekolah
Kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> o memiliki setidaknya satu anggota keluarga yang kekurangan gizi o memiliki satu atau lebih anak yang meninggal dunia .
Standar hidup	<ul style="list-style-type: none"> o tidak memiliki listrik o tidak memiliki akses air minum bersih o tidak memiliki akses ke sanitasi yang memadai o menggunakan bahan bakar memasak dari bahan bakar arang, batubara atau kayu bakar o memiliki rumah dengan lantai tanah o tidak memiliki kendaraan bermotor dan hanya memiliki salah satu barang berikut ini : sepeda, sepeda motor , radio , kulkas , telepon, atau televisi .

*Menyesuaikan kondisi di Indonesia

Setiap orang diberi skor sesuai dengan kekurangan rumah tangganya menurut 10 indikator yang membentuknya. Skor maksimum adalah 100 persen sehingga masing-masing dimensi memiliki penimbang yang sama, yaitu 33,3 persen. Dimensi pendidikan dan kesehatan masing-masing memiliki dua indikator, sehingga setiap komponen memiliki penimbang sebesar 16,7 persen. Sementara dimensi standar hidup memiliki 6 indikator sehingga setiap indikator memiliki penimbang sebesar 5,6 persen .

Untuk mengidentifikasi kemiskinan rumah tangga secara multidimensi, skor ke 10 komponen indikator untuk setiap rumah tangga dijumlahkan. Sebuah cut off point (c) sebesar 33,3 persen yang setara dengan sepertiga dari indikator tertimbang digunakan untuk membedakan antara RT yang miskin dan tidak miskin secara multidimensi.

- Jika $c > 50\%$, maka RT dan seluruh anggota RT dianggap sangat miskin multidimensional
- Jika $50\% \geq c > 33\%$, maka RT dan seluruh anggota RT dianggap miskin multidimensional.
- Jika $c \leq 33,3\%$, maka RT dan seluruh anggota RT tidak dianggap miskin multidimensional
- Jika $20\% \leq c < 33,3\%$, maka RT dan seluruh anggota RT dianggap rentan miskin multidimensional

IKM merupakan perkalian antara proporsi penduduk yang mengalami kemiskinan dan intensitas kemiskinan individu atau

$$IKM = H \times A$$

dimana:

H : Head count ratio, adalah proporsi penduduk yang miskin didapat dari

$$H = \frac{q}{n}$$

dimana q adalah jumlah orang multidimensional miskin
n adalah total populasi

A : Intensitas Kemiskinan, mencerminkan proporsi tertimbang dari indikator, atau rata-rata kekurangan dari orang-orang miskin. Untuk rumah tangga miskin saja, nilai kekurangan dijumlahkan dan dibagi dengan jumlah total orang miskin didapat dari

$$A = \frac{\sum_1^q c}{q}$$

dimana q adalah jumlah orang yang multidimensional miskin

c adalah skor kekurangan masing-masing RT

Contoh:

Indikator	Rumah tangga				Weights
	1	2	3	4	
Jumlah Anggota Rumah Tangga	4	7	5	4	
Pendidikan					
▪ tidak memiliki anggota keluarga yang telah menyelesaikan pendidikan selama 9 tahun	0	1	0	1	16,7%
▪ memiliki setidaknya satu anak usia sekolah (sampai kelas 9) yang putus sekolah	0	1	0	0	16,7%
Kesehatan					
○ memiliki setidaknya satu anggota keluarga yang kekurangan gizi	0	0	1	0	16,7%
○ memiliki satu atau lebih anak yang meninggal dunia	1	1	1	1	16,7%
Kondisi perumahan					
○ tidak memiliki listrik	0	1	1	1	5,6%
○ tidak memiliki akses air minum bersih	0	0	1	0	5,6%
○ tidak memiliki akses ke sanitasi yang memadai	0	0	0	0	5,6%
○ menggunakan bahan bakar memasak dari bahan bakar arang, batubara atau kayu bakar	1	1	1	1	5,6%
○ memiliki rumah dengan lantai tanah	0	1	0	1	5,6%
○ tidak memiliki kendaraan bermotor dan hanya memiliki salah satu barang berikut ini : sepeda, sepeda motor, radio, kulkas, telepon, atau televisi					
Skor kekurangan RT (c=jumlah tertimbang dari skor tertimbang RT)	22,2	72,7	38,9	50	
Apakah RT miskin ? (c > 33,3 %)	tidak	ya	ya	ya	

Headcount rasio (H) =

$$((7+5+4)/(4+7+5+4))= 0,8$$

(80 persen dari penduduk tinggal dalam RT miskin)

Intensitas kemiskinan (A) =

$$((7,27/10 \times 7)+(3,89/10 \times 5)+(5/10 \times 4))/((7+5+4)) = 0,5625$$

(rata-rata orang miskin mengalami kekurangan multidimensi sebesar 56 persen dari dilihat dari 10 indikator IKM).

Indeks Kemiskinan Multidimensi (IKM) = $0,8 \times 0,5625 = 0,450$

(rata-rata penduduk mengalami kekurangan multidimensi sebesar 45 persen dari dilihat dari 10 indikator IKM).

Catatan Teknis 2. KETAHANAN PANGAN

Undang-undang Republik Indonesia No 18 tahun 2012 tentang pangan menyebutkan bahwa pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai komponen dasar untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas. Lebih lanjut dalam undang-undang yang sama disebutkan bahwa Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya Pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.

Untuk mengetahui ketahanan pangan suatu daerah dilakukan pendekatan dengan menghitung Indeks Ketahanan Pangan. Indeks ini terdiri dari tiga dimensi yaitu dimensi ketersediaan pangan, Keterjangkauan/ Akses pangan, dan Pemanfaatan pangan. Keterbatasan data pada survey ini menyebabkan Indeks Ketahanan Pangan tidak bisa dilakukan tetapi didekati dengan melakukan scoring dari jawaban-jawaban pada kuesioner yang juga dikelompokkan menjadi tiga dimensi. Karena keterbatasan data tiap dimensi hanya diwakili 1 aspek masing-masing yaitu kecukupan pangan, keterjangkauan fisik, ekonomi, sosial dan 2 aspek untuk dimensi pemanfaatan pangan diantaranya yaitu kecukupan asupan serta kualitas air.

Tabel 2. Dimensi Ketahanan Pangan

Dimensi	Aspek	Indikator	Skor
Ketersediaan pangan	Kecukupan pangan	Kecukupan persediaan pangan	0-6
		Tidak kekurangan pangan	0-3
		Ketakutan kekurangan pangan	0-3

Keterjangkauan/akses pangan	Keterjangkauan fisik, ekonomi, sosial	Pangan diproduksi di kecamatan	0-1
		Tidak mengalami kesulitan menjangkau lokasi pembelian	0-1
		Harga pembelian tidak tinggi	0-1
Pemanfaatan pangan	Kecukupan asupan	Tidak ada balita yang kurang gizi	0-1
		Tidak ada balita yang meninggal karena sakit	0-1
	Kualitas air	Sumber air minum utama	0-3
		Sumber air untuk masak yang utama	0-3

*Pembentukan skor dapat dilihat pada lampiran.

Pemberian skor untuk masing-masing dimensi dapat dilihat sebagai berikut:

I. Dimensi Ketersediaan pangan

Pengertian ketersediaan pangan dalam UU No.18 tahun 2012 adalah kondisi tersedianya pangan dari hasil produksi dalam negeri dan cadangan pangan nasional serta impor apabila kedua sumber utama tidak dapat memenuhi kebutuhan. Dimensi ketersediaan pangan diwakili oleh aspek kecukupan pangan dilihat dari tiga indikator masing-masing kecukupan persediaan pangan, tidak kekurangan pangan, dan ketakutan kekurangan pangan.

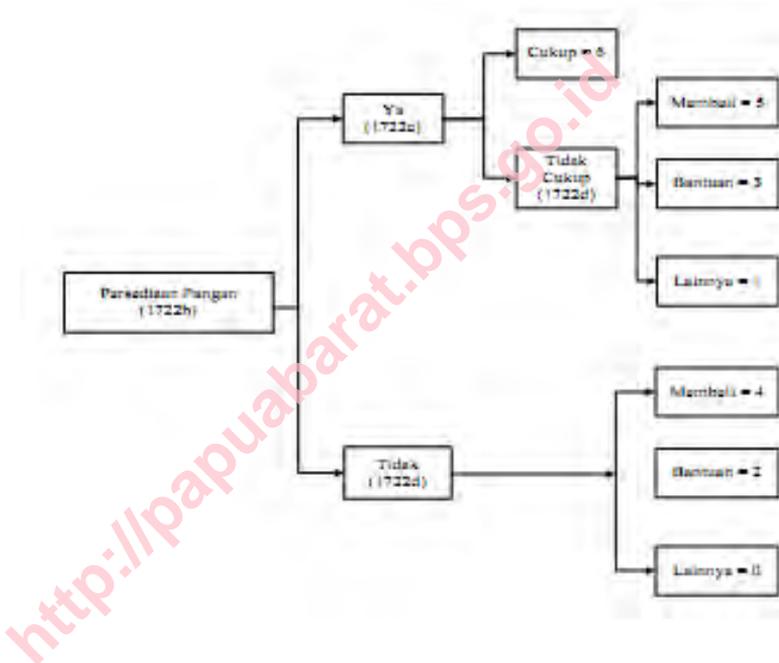
§ Aspek Kecukupan pangan

1. Indikator Kecukupan persediaan pangan

Kecukupan persediaan pangan yang dimaksud adalah apakah kebutuhan akan pangan selama setahun yang lalu telah tercukupi dalam rumah tangga tersebut. Dalam kuesioner SPP 2013 indikator ini didapatkan dari pertanyaan Rincian 1722b, Rincian 1722c dan Rincian 1722d.

- Skor 6 diberikan jika rumah tangga mempunyai persediaan makanan dan cukup selama setahun yang lalu atau rumah tangga tidak mengalami shortage (kekurangan).
- Skor 5 diberikan jika rumah tangga mempunyai persediaan makanan dan mencukupi kekurangan makanan dari membeli.
- Skor 4 diberikan jika rumah tangga tidak mempunyai persediaan makanan dan mencukupinya dari membeli.

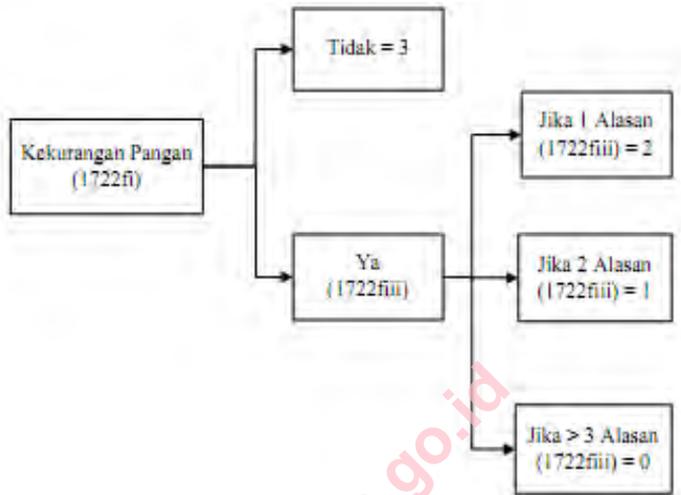
- Skor 3 diberikan jika rumah tangga mempunyai persediaan makanan dan mencukupi kekurangan makanan bantuan.
- Skor 2 diberikan jika rumah tangga tidak mempunyai persediaan makanan dan mencukupinya dari bantuan.
- Skor 1 diberikan jika rumah tangga mempunyai persediaan makanan dan mencukupi kekurangan makanan dari lainnya.
- Skor 0 diberikan jika rumah tangga tidak mempunyai persediaan makanan dan mencukupinya dari lainnya.



2. Indikator Tidak kekurangan pangan

Kekurangan pangan merupakan kondisi tidak mampu mengonsumsi makanan sesuai kebiasaannya atau tidak mampu mempertahankan pola makan normal setiap saat selama periode setahun yang lalu dan merubah pola makan secara terpaksa seperti melewatkan makan, makan lebih sedikit, makan lebih murah, dan mungkin makanan kurang bergizi.

Pengukuran kekurangan makanan adalah dengan melihat Rincian 1722fi, Skor 3 diberikan apabila jawaban adalah tidak kekurangan pangan. Sedangkan apabila jawabannya ya diberi skor berdasarkan alasan/penyebab kekurangan pangan. Penyebab kekurangan pangan diartikan sebagai kejadian luar biasa seperti bencana alam, tanaman rusak/mati, kurangnya lahan, tidak ada pekerjaan, tidak mampu bekerja karena sakit/cedera/tua, kurangnya modal, terlalu banyaknya anggota keluarga yang ditanggung, dan lain-lain. Penyebab kekurangan pangan dalam kuesioner ditunjukkan pada rincian 1722 fiif yang terbagi menjadi empat pilihan yaitu pendapatan rendah, lokasi terpencil, tidak tersedia, dan lainnya. Jika hanya memilih satu alasan maka diberi skor 2, skor 1 untuk 2 alasan, dan skor 0 untuk alasan lebih dari 3. Skor yang besar menunjukkan tidak adanya kekurangan pangan.



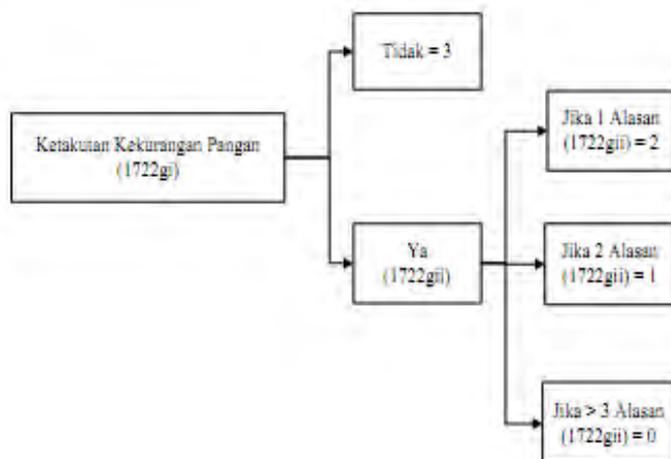
3. Indikator Ketakutan kekurangan pangan

Indikator ini mengukur rasa ketakutan akan kekurangan pangan untuk satu tahun ke depan dan alasan ketakutan akan kekurangan pangan dilihat dari rincian 1722gi dan 1722gii.

Ketakutan akan kekurangan pangan diartikan sebagai rasa takut terhadap situasi kekurangan makanan selama periode setahun yang akan datang karena ancaman bencana alam, rusak/matinya tanaman, kehilangan pekerjaan, atau faktor lainnya.

Skor yang besar menunjukkan tidak adanya ketakutan kekurangan pangan.

- Skor 3 diberikan jika rumah tangga tidak ketakutan kekurangan pangan
- Skor 2 diberikan jika rumah tangga kekurangan pangan karena 1 penyebab
- Skor 1 diberikan jika rumah tangga kekurangan pangan karena 2 penyebab
- Skor 0 diberikan jika rumah tangga kekurangan pangan karena 3 penyebab



II. Dimensi Keterjangkauan/akses pangan

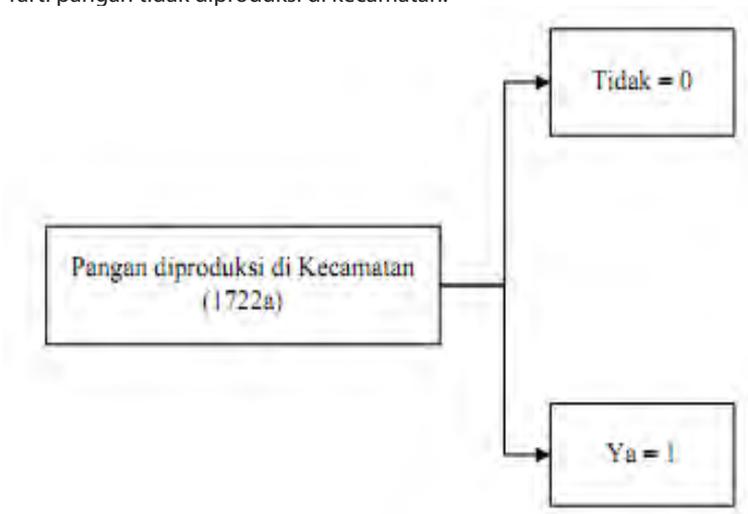
Akses Pangan adalah kemampuan rumah tangga untuk memperoleh cukup pangan, baik yang berasal dari produksi sendiri, stok, pembelian, barter, hadiah, pinjaman dan bantuan pangan. Ketersediaan pangan di suatu daerah mungkin mencukupi, akan tetapi tidak semua rumah tangga memiliki akses yang memadai baik secara kuantitas maupun keragaman pangan melalui mekanisme tersebut di atas.

Akses pangan tergantung pada daya beli rumah tangga yang ditentukan oleh sumber penghidupan rumah tangga tersebut. Penghidupan terdiri dari kemampuan rumah tangga, modal/aset (sumber daya alam, fisik, sumber daya manusia, ekonomi dan sosial) dan kegiatan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup dasar – penghasilan, pangan, tempat tinggal, kesehatan dan pendidikan. Rumah tangga yang tidak memiliki sumber penghidupan yang memadai dan berkesinambungan, sewaktu-waktu dapat berubah, menjadi tidak berkecukupan, tidak stabil dan daya beli menjadi sangat terbatas, yang menyebabkan tetap miskin dan rentan terhadap kerawanan pangan. Dimensi keterjangkauan terdiri dari satu aspek yaitu aspek keterjangkauan fisik, ekonomi, dan social. Aspek ini dibentuk oleh tiga indikator yaitu Indikator Pangan yang diproduksi di Kecamatan, Indikator Tidak mengalami kesulitan menjangkau lokasi pembelian, dan Indikator Harga pembelian tidak tinggi.

5 Aspek Keterjangkauan fisik, ekonomi, sosial

1. Indikator Pangan diproduksi di kecamatan

Pangan yang sebagian besar diproduksi di kecamatan menunjukkan kemudahan akses memperoleh pangan. Jika sebagian besar pangan diproduksi di kecamatan maka akan memudahkan orang-orang sekitar dalam mencukupi kebutuhannya. Tempat tinggal yang dekat dengan tempat produksi akan memudahkan mendapatkan pangan serta persediaan pangan akan terus ada karena mudahnya akses yang dapat dijangkau, tanpa perlu mencari ke tempat yang lebih jauh. Jika pangan diproduksi di kecamatan atau jika jawaban pada rincian 1722a adalah Ya maka skor 1 akan diberikan, dan 0 jika jawaban Tidak yang berarti pangan tidak diproduksi di kecamatan.



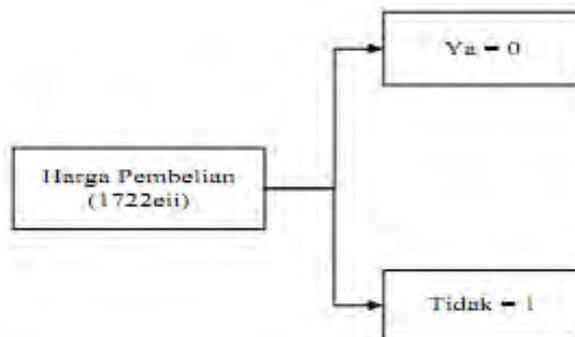
2. Indikator Tidak mengalami kesulitan menjangkau lokasi pembelian

Ketersediaan yang cukup di suatu wilayah belum tentu menggambarkan wilayah tersebut bebas kerawanan pangan. Aksesibilitas untuk mendapatkan pangan yang sulit bisa menjadi penyebab kerawanan pangan. Kemudahan akses akan memudahkan perolehan pangan yang dibutuhkan. Ada tidaknya kesulitan menjangkau lokasi pembelian pangan diukur dengan melihat rincian 1722ei. Jika tidak terdapat kesulitan maka diberi skor 1 dan jika terdapat kesulitan maka diberi skor 0.



3. Indikator Harga pembelian tidak tinggi

Indikator ketiga yang mengukur dimensi keterjangkauan/akses pangan adalah harga pembelian. Ketersediaan pangan yang cukup, lokasi pembelian pangan yang mudah dijangkau akan tetapi harga pembelian pangan tinggi dapat menyebabkan kerawanan pangan. Harga pembelian ini menunjukkan keterjangkauan terhadap kondisi ekonomi rumah tangga. Rumah tangga dengan kondisi ekonomi yang baik akan memudahkan mendapatkan pangan meskipun dengan harga yang tinggi. Berbeda dengan rumah tangga yang kondisi ekonominya buruk atau berkategori miskin. Harga yang terlalu tinggi akan menyulitkan rumah tangga untuk membeli kebutuhan hidupnya baik sandang maupun pangan. Indikator ini diwakili dalam kuesioner pada rincian 1722eii. Skor 1 menunjukkan harga pembelian yang tidak tinggi dan skor 0 jika harga pembelian tinggi.



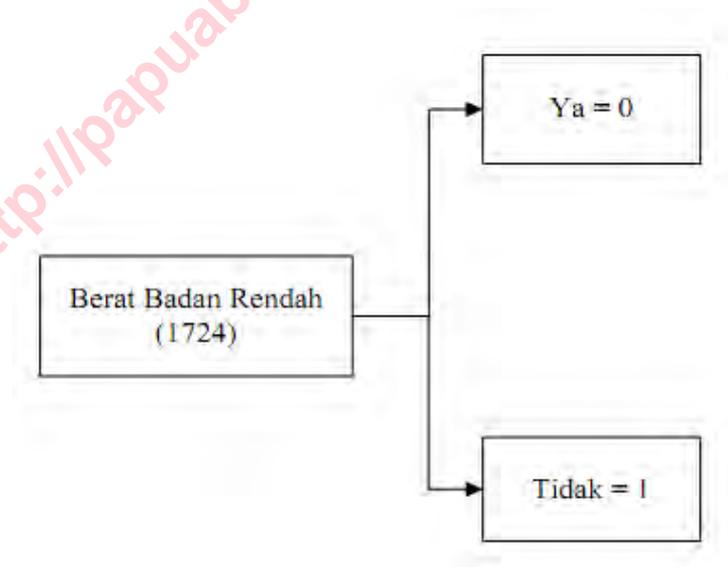
III. Dimensi Pemanfaatan pangan

Pemanfaatan pangan meliputi penggunaan pangan oleh rumah tangga serta meliputi cara penyimpanan, pengolahan dan penyiapan makanan termasuk penggunaan air serta meliputi status kesehatan anggota rumah tangga. Dimensi pemanfaatan pangan diwakili dua aspek yaitu kecukupan asupan untuk melihat status kesehatan yang diukur dengan dua indikator yaitu tidak ada balita yang kurang gizi dan tidak ada balita yang meninggal karena sakit. Aspek yang kedua adalah kualitas air yang diukur oleh dua indikator yaitu sumber air minum utama dan sumber air masak utama.

5 Aspek Kecukupan asupan

1. Indikator Tidak ada balita yang kurang gizi

Status kesehatan rumah tangga dapat dilihat dengan ada tidaknya balita yang kekurangan gizi atau berat badan yang rendah. Kurangnya gizi pada balita mencerminkan asupan yang kurang pada rumah tangga tersebut. Berat badan balita di bawah normal dapat diketahui dari Kartu Menuju Sehat (KMS) dari Posyandu yaitu berat badan di bawah garis merah. Pertanyaan mengenai balita yang kurang gizi terdapat pada rincian 1724. Skor 1 diberikan jika tidak terdapat balita yang memiliki berat badan rendah sedangkan skor 0 jika terdapat balita dengan berat badan rendah.



2. Indikator Tidak ada balita yang meninggal karena sakit

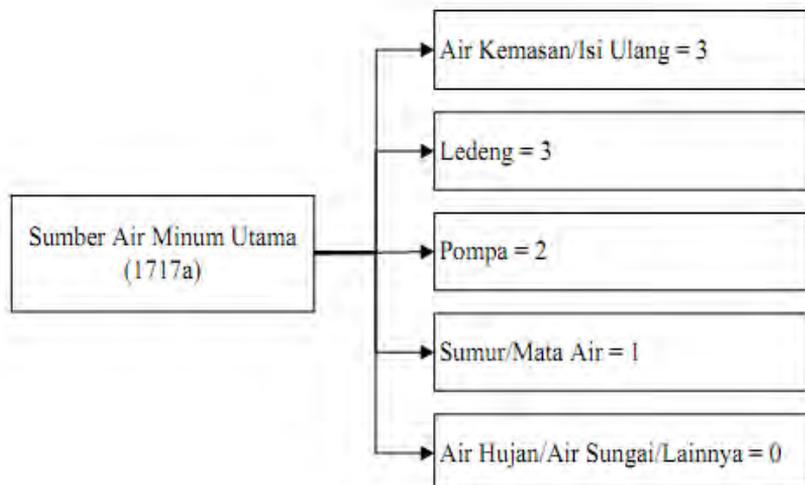
Indikator lain yang mengukur kurangnya asupan adalah ada tidaknya balita yang meninggal karena sakit. Seperti halnya indikator pertama yaitu balita dengan berat badan rendah, indikator ini mencerminkan kesehatan rumah tangga, yang terwakili dari kuesioner rincian 1725. Skor 1 jika tidak terdapat balita yang meninggal karena sakit. Skor 0 jika terdapat balita yang meninggal karena sakit.



5 Aspek Kualitas air

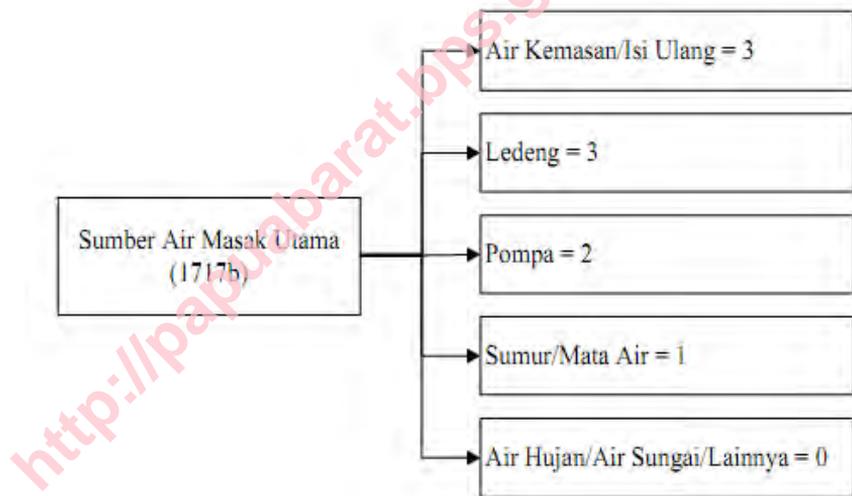
1. Indikator Sumber air minum utama

Selain kecukupan asupan, aspek lain yang mewakili dimensi pemanfaatan pangan adalah kualitas air. Salah satu indikator yang mengukur kualitas air yaitu sumber air utama. Dalam hal ini dilihat pada rincian 1717a yang terdiri dari 8 pilihan jawaban diantaranya adalah Air kemasan/isi ulang, ledeng, pompa, sumur, mata air, air sungai, air hujan dan lainnya. Pemberian skor pada indikator ini dengan membagi 8 pilihan menjadi 5. Skor 3 diberikan jika sumber air minum utama adalah air kemasan/isi ulang atau ledeng, skor 2 untuk pilihan isian pompa, skor 1 untuk sumur atau mata air dan tidak diberikan skor (0) untuk pilihan air hujan, air sungai atau lainnya. Semakin tinggi skor berarti kualitas airnya semakin baik.



2. Indikator Sumber air untuk memasak utama

Indikator kedua yang mengukur aspek kualitas air adalah sumber air masak utama. Pemanfaatan air untuk masak menggambarkan dimensi pemanfaatan pangan rumah tangga. Air yang digunakan untuk memasak baik atau tidaknya akan memengaruhi kesehatan bagi anggota rumah tangga. Semakin baik kualitas air yang dimanfaatkan untuk memasak akan menghindarkan anggota rumah tangga mengalami kesehatan yang buruk. Dalam hal ini dilihat pada rincian 1717b yang terdiri dari 8 pilihan jawaban diantaranya adalah Air kemasan/isi ulang, ledeng, pompa, sumur, mata air, air sungai, air hujan dan lainnya. Pemberian skor pada indikator ini dengan membagi 8 pilihan menjadi 5 seperti pada sumber air minum utama. Skor 3 diberikan jika sumber air masak utama adalah air kemasan/isi ulang atau ledeng, skor 2 untuk pilihan isian pompa, skor 1 untuk sumur atau mata air dan tidak diberikan skor (0) untuk pilihan air hujan, air sungai atau lainnya. Semakin tinggi skor berarti kualitas airnya semakin baik.



Penghitungan Indeks Ketahanan Pangan Wilayah

Kemungkinan Skor:

No.	Dimensi	Total Skor	
		Min	Maks
1.	Ketersediaan Pangan	0	12
2.	Keterjangkauan/Akses Pangan	0	3
3.	Pemanfaatan Pangan		
	Aspek kecukupan asupan	0	2
	Aspek kualitas air	0	8

Rata-rata skor untuk masing-masing dimensi disimbolkan dengan \bar{X}_i ,
dimana i menunjukkan dimensi,

1. Rata-rata skor dimensi Ketersediaan pangan (\bar{X}_1)
Terdiri dari satu aspek yaitu kecukupan pangan.

$$\bar{X}_1 = \frac{\sum_{k=1}^3 \sum_{l=1}^n X_{1kl}}{n}$$

yang selanjutnya dikonversikan ke dalam persentase

$$\bar{X}_1 = \frac{\left(\frac{\sum_{k=1}^3 \sum_{l=1}^n X_{1kl}}{n} \right)}{12} \times 100\%$$

Keterangan :

$i = 1$ (dimensi ketersediaan pangan)

$j = 1$ (aspek kecukupan pangan)

$k = 1, 2, 3$ (indikator untuk aspek kecukupan pangan)

$l = 1, 2, \dots, n$ (rumah tangga wilayah masing-masing)

2. Rata-rata skor dimensi Keterjangkauan/akses pangan (\bar{X}_2)
Terdiri dari satu aspek yaitu keterjangkauan fisik, ekonomi, sosial

$$\bar{X}_2 = \frac{\sum_{k=1}^3 \sum_{l=1}^n X_{2kl}}{n}$$

yang selanjutnya dikonversikan ke dalam persentase

$$\bar{X}_2 = \frac{\left(\frac{\sum_{k=1}^3 \sum_{l=1}^n X_{2kl}}{n} \right)}{3} \times 100\%$$

Keterangan :

$i = 2$ (dimensi Keterjangkauan/akses pangan)

$j = 1$ (aspek keterjangkauan fisik, ekonomi, sosial)

$k = 1, 2, 3$ (indikator untuk keterjangkauan fisik, ekonomi, sosial)

$l = 1, 2, \dots, n$ (rumah tangga wilayah masing-masing)

3. Rata-rata skor dimensi Pemanfaatan pangan (X_3)
Terdiri dari dua aspek, yaitu

- Aspek Kecukupan asupan (X_{31})

$$\bar{X}_{31} = \frac{\sum_{k=1}^2 \sum_{l=1}^n X_{31kl}}{n}$$

yang selanjutnya dikonversikan ke dalam persentase

$$\bar{X}_{31} = \frac{\left(\frac{\sum_{k=1}^2 \sum_{l=1}^n X_{31kl}}{n} \right)}{2} \times 100\%$$

Keterangan :

$i = 3$ (dimensi Pemanfaatan pangan)

$j = 1$ (aspek kecukupan asupan)

$k = 1, 2$ (indikator untuk aspek kecukupan asupan)

$l = 1, 2, \dots, n$ (rumah tangga wilayah masing-masing)

- Aspek Kualitas air

$$\bar{X}_{32} = \frac{\sum_{k=1}^2 \sum_{l=1}^n X_{32kl}}{n}$$

yang selanjutnya dikonversikan ke dalam persentase

$$\bar{X}_{32} = \frac{\left(\frac{\sum_{k=1}^2 \sum_{l=1}^n X_{32kl}}{n} \right)}{6} \times 100\%$$

Keterangan :

$i = 3$ (dimensi Pemanfaatan pangan)

$j = 2$ (aspek kualitas air)

$k = 1, 2$ (indikator untuk aspek kualitas air)

$l = 1, 2, \dots, n$ (rumah tangga wilayah masing-masing)

Sehingga, rata-rata skor untuk dimensi ketahanan pangan, yaitu:

$$\bar{X}_3 = \frac{(\bar{X}_{31} + \bar{X}_{32})}{2}$$

	o Harga pembelian tidak tinggi	1	1	0	0	2	
Pemanfaatan Pangan	Kecukupan Asupan						6 24
	o Tidak ada balita yang kurang gizi	1	1	0	1	3	
	o Tidak ada balita yang meninggal karena sakit	1	1	1	0	3	
	Kecukupan Asupan						
	o Sumber air minum utama	3	3	1	2	9	18
	o Sumber air untuk masak yang utama	3	3	1	2	9	

- 1) Rata-rata skor dimensi ketersediaan pangan:

$$\bar{X}_1 = \frac{\sum_{k=1}^3 \sum_{l=1}^n X_{1kl}}{n} = \frac{(15+6+3)}{4} = 6$$

dan konversi dalam persentase

$$\bar{X}_1 = \frac{\left(\frac{\sum_{k=1}^3 \sum_{l=1}^n X_{1kl}}{n} \right)}{12} \times 100\% = \frac{\left(\frac{(15+6+3)}{4} \right)}{12} \times 100\% = \frac{6}{12} \times 100\% = 50\%$$

- 2) Rata-rata skor dimensi keterjangkauan/akses pangan:

$$\bar{X}_2 = \frac{\sum_{k=1}^3 \sum_{l=1}^n X_{2kl}}{n} = \frac{(3+3+2)}{4} = 2$$

dan konversi dalam persentase

$$\bar{X}_2 = \frac{\left(\frac{\sum_{k=1}^3 \sum_{l=1}^n X_{2kl}}{n} \right)}{3} \times 100\% = \frac{\left(\frac{(3+3+2)}{4} \right)}{3} \times 100\% = \frac{2}{3} \times 100\% = 66,67\%$$

- 3) Rata-rata skor dimensi keterjangkauan/akses pangan:
 a. Aspek Kecukupan asupan:

$$\bar{X}_{31} = \frac{\sum_{k=1}^2 \sum_{l=1}^n X_{31kl}}{n} = \frac{(3+3)}{4} = 1,5$$

dan konversi dalam persentase

$$\bar{X}_{31} = \frac{\left(\frac{\sum_{k=1}^2 \sum_{l=1}^n X_{31kl}}{n} \right)}{2} \times 100\% = \frac{\left(\frac{(3+3)}{4} \right)}{2} \times 100\% = \frac{1,5}{2} \times 100\% = 75\%$$

- b. Aspek Kualitas air:

$$\bar{X}_{32} = \frac{\sum_{k=1}^2 \sum_{l=1}^n X_{32kl}}{n} = \frac{(9+9)}{4} = 4,5$$

dan konversi dalam persentase

$$\bar{X}_{32} = \frac{\left(\frac{\sum_{k=1}^2 \sum_{l=1}^n X_{32kl}}{n} \right)}{6} \times 100\% = \frac{\left(\frac{(9+9)}{4} \right)}{6} \times 100\% = \frac{4,5}{6} \times 100\% = 75\%$$

Sehingga rata-rata skor untuk dimensi pemanfaatan pangan:

$$\bar{X}_3 = \frac{(\bar{X}_{31} + \bar{X}_{32})}{2} = \frac{(75\% + 75\%)}{2} = 75\%$$

Jadi, Indeks ketahanan pangannya adalah

$$\bar{X} = \frac{\sum_{i=1}^3 \bar{X}_i}{3} = \frac{(50\% + 66,67\% + 75\%)}{3} = 63,89\%$$

Untuk kategori ketahanan pangan maka dibandingkan dengan ketahanan pangan nasional.

Penghitungan Indeks Ketahanan Pangan RTUP

Ketahanan pangan suatu wilayah belum tentu menggambarkan ketahanan pangan rumah tangganya. Oleh karena itu akan dilihat juga bagaimana ketahanan pangan pada level yang paling kecil (rumah tangga).

1. Dimensi ketersediaan pangan
Rata-rata skor dimensi ketersediaan pangan

$$\bar{y}_{1i} = \frac{\sum_{k=1}^3 y_{1k}}{12}$$

Keterangan :

$i = 1, \dots, n$ (jumlah rumah tangga)

$k = 1, 2, 3$ (indikator untuk setiap dimensi)

2. Dimensi keterjangkauan/akses pangan
Rata-rata skor dimensi keterjangkauan/akses pangan

$$\bar{y}_{2i} = \frac{\sum_{k=1}^3 y_{2k}}{3}$$

Keterangan :

$i = 1, \dots, n$ (jumlah rumah tangga)

$k = 1, 2, 3$ (indikator untuk setiap dimensi)

3. Dimensi pemanfaatan pangan
Rata-rata skor aspek kecukupan pangan

$$\bar{y}_{31i} = \frac{\sum_{k=1}^3 y_{31k}}{2}$$

Rata-rata skor aspek kecukupan pangan

$$\bar{y}_{32i} = \frac{\sum_{k=1}^3 y_{32k}}{2}$$

Keterangan :

$i = 1, \dots, n$ (jumlah rumah tangga)

$k = 1, 2$ (indikator untuk setiap aspek)

Rata-rata skor dimensi pemanfaatan pangan

$$\bar{y}_{3i} = \frac{\bar{y}_{31i} + \bar{y}_{32i}}{2}$$

- **Rata-rata skor ketahanan pangan rumah tangga:**

$$\bar{y}_i = \frac{\bar{y}_{1i} + \bar{y}_{2i} + \bar{y}_{3i}}{3}$$

Contoh :

Dimensi	Aspek dan Indikator	Rumah tangga				Skor Max dimensi
		1	2	3	4	
Ketersediaan Pangan	Kecukupan Pangan					
	<ul style="list-style-type: none"> • Kecukupan persediaan pangan • Tidak kekurangan pangan • Ketakutan kekurangan pangan 	4 3 1	6 3 2	2 0 0	3 0 0	12
	Total skor	8	11	2	3	
	Rata-rata skor dimensi kecukupan pangan	8/1 2	11/ 12	2/12	3/1 2	
Keterjangkauan/Akses Pangan	Keterjangkauan Fisik, Ekonomi, Sosial					
	<ul style="list-style-type: none"> ○ Pangan diproduksi di kecamatan ○ Tidak mengalami kesulitan menjangkau lokasi pembelian ○ Harga pembelian tidak tinggi 	1 1 1	1 1 1	0 0 0	1 1 0	3
	Total skor	3	3	0	2	
	Rata-rata skor dimensi keterjangkauan pangan	3/3 3/3	3/3 0/3	0/3 2/3	2/3	
Pemanfaatan Pangan	Kecukupan Asupan					
	<ul style="list-style-type: none"> ○ Tidak ada balita yang kurang gizi ○ Tidak ada balita yang meninggal karena sakit 	1 1	1 1	0 1	1 0	2
	Total Skor	2	2	1	1	
	Rata-rata skor aspek kecukupan pangan	2/2	2/2	1/2	1/2	
	Kecukupan Asupan					8
	<ul style="list-style-type: none"> ○ Sumber air minum utama ○ Sumber air untuk masak yang utama 	3 3	3 3	1 1	2 2	
	Total Skor	6	6	2	4	
	Rata-rata skor aspek kecukupan pangan	6/8	6/8	2/8	4/8	
Rata-rata skor dimensi pemanfaatan pangan	$\frac{1,75}{2}$	$\frac{1,75}{2}$	$\frac{0,75}{2}$	$\frac{1}{2}$		
Skor Ketahanan Pangan Rumah Tangga	0,84 7	0,93 1	0,18 1	0,47 2		

DATA

MENCERDASKAN BANGSA

<http://papuabarar.bps.go.id>



BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI PAPUA BARAT

Jl. Trikora Sowi IV-Manokwari-Papua Barat-98315

Telp : (0986) 214199 Fax.(0986) 214199

Homepage : <http://www.irjabar.bps.go.id> E-mail : bps9100@bps.go.id

ISBN : 978-602-709-242-6



9 786027 092426